

**PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI DAN
MORALITAS TERHADAP KECURANGAN PADA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh

SRI JUMIATI ABELIA MAHMUD

E1121050

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS TERHADAP KECURANGAN PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

SRI JUMIATI ABELIA MAHMUD

E1121050

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah di setujui oleh tim pembimbing pada tanggal**

Gorontalo, 09 Mei 2025

Pembimbing I

Parmin Ishak, S.Akun., M.Ak
NIDN : 0919099202

Pembimbing II

Nurbaiti S. Mokoginta, S.E., M.Ak
NIDN : 1618078701

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Sheila Budigwati, SE., M.Ak
NIDN: 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS TERHADAP KECURANGAN PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH

SRI JUMIATI ABELIA MAHMUD

E1121050

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo
(Gorontalo, 09 Mei 2025)

1. **Rahma Rizal, S.E., Ak., M.Si**
(Ketua Penguji)
2. **Nur Lazimatul Hilma Sholehah, S.Akun., M.Ak**
(Anggota Penguji)
3. **Afriana Lomagio, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
4. **Parmin Ishak, S.Akun., M.Ak**
(Pembimbing Utama)
5. **Nurbaiti S. Mokoginta, S.E., M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



DR. MUSAFIR, SE., M.Si
NIDN. 09028116901



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto ;

“Allah tidak pernah menaruh tanggung jawab dibahu yang salah, jika kamu terpilih berarti kamu yang mampu.”

(Al-Baqarah : 286)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia, Jadi tidak mungkin aku Tidak ada artinya.”

Persembahan ;

Dengan rasa bersyukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya karya tulis ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Bapak Amir Mahmud tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan. Terima kasih pak, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.

2. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibu Asni Potionua tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang, dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengeyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih Ibu, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang dilautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Akuntansi.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Parmin Ishak, S. Akun.,M. Ak dan Ibu Nurbaiti Mokoginta., SE., M. Ak yang sudah membimbing dan telah banyak memberikan masukan, kritik-saran serta memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini.
4. Kedua adik laki-laki penulis, Abd. Nazar Mahmud dan Abdul Rahmat Mahmud, terima kasih atas segala do'a dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Kepada keluarga penulis, terima kasih telah mensupport penulis sehingga penulis bisa bertahan sejauh ini, dan terima kasih atas segala dukungan do'a maupun material.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 21 yang saat ini juga berjuang untuk menggapai gelar sarjana, terima kasih telah membuktikan bahwa teman kuliah tidak seburuk itu. Terima kasih pula atas dukungan kalian mulai dari Maba sampai di tahap ini.
7. Dan terakhir kepada perempuan yang sederhana namun terkadang sulit dimengerti, sang penulis skripsi yaitu saya sendiri, Sri Jumiati Abelia Mahmud.

Seorang anak pertama perempuan usia 21 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, Terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, Mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamau berada.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Ichsan Gorontalo dan perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sebagai penulis diarahkan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji saya.
3. Dalam karya tulis yang saya buat ini tidak terdapat karya atau pendapat dari penulis lain. Tanpa memberikan pengakuan pada penulis asli yang disebut dalam referensi dan tertera dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan pada pernyataan ini. Maka saya akan menerima sanksi akademik, dan sanksi sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Gorontalo 29 April 2025
Saya yang bertanda tangan dibawah ini



(Sri Jumiati Abelia Mahmud)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan Rahmat, nikmat, kemudahan serta kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini, Muhammad Ichsan Gaffar.,SE.,M.Ak., CPA, AICPA selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Hj. Juriko Abdusammad, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Parmin Ishak, S.Akun.,M.Ak, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Nurbaiti S. Mokoginta, S.E.,M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini, Ucapan terima kasih kepada Responden yang telah membantu penulis, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini, Ucapan terima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua yang tak pernah berhenti bedo'a untuk kemudahan dan keberhasilan penulis.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, April 2025

Penulis

ABSTRACT

SRI JUMIATI ABELIA MAHMUD. E1121050. THE EFFECT OF COMPENSATION SUITABILITY AND MORALITY ON FRAUD IN THE VILLAGE GOVERNMENT OF ANGGREK SUBDISTRICT IN NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to analyze the effect of compensation suitability and morality on fraud in the village government of Anggrek Subdistrict in North Gorontalo Regency. This study is quantitative research. The data source in the study is primary data. The sampling technique is cluster sampling. Data collection employs a questionnaire distributed to respondents. In this study, there are three variables, consisting of 2 independent variables, namely compensation suitability and morality, and the dependent variable, namely fraud. Data processing applies the SmartPLS 3.0 tool. The results of this study indicate that compensation suitability does not have a positive effect on fraud. Compensation suitability does not have a positive effect on morality. However, Compensation Suitability has a positive effect on fraud through morality.

Keywords: compensation suitability, morality, fraud



ABSTRAK

SRI JUMIATI ABELIA MAHMUD. E1121050. PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS TERHADAP KECURANGAN PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan pada pemerintah desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan cara *cluster sampling*. Sumber data dalam penelitian adalah data primer. Data diambil menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Pada penelitian ini, ada tiga variable yang terdiri dari 2 variabel bebas yaitu kesesuaian kompensasi dan moralitas, dan variable terikat, yaitu kecurangan. Pengolahan data yang digunakan menggunakan alat SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap kecurangan. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap moralitas. Namun, kesesuaian berpengaruh positif terhadap kecurangan melalui moralitas.

Kata kunci: kesesuaian kompensasi, moralitas, kecurangan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	x
LEMBAR PENGESAHAN.....	SKRIPSI.....
.....	x
HALAMAN PERSETUJUAN	
.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
MOTTO DAN PERSEMAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKKesalahan!	Bookmark
ditentukan.....	tidak
.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Theory Hexagon Fraud	10
2.1.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	13
2.1.3 Audit	19
2.1.4 Kesesuaian Kompensasi	21
2.1.5 Moralitas.....	26
2.1.6 Desa.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Hipotesis Penelitian.....	37

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Obyek Penelitian	40
3.2 Metode Penelitian.....	40
3.2.1 Metode yang digunakan.....	40
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	40
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
3.3.1 Populasi Penelitian	42
3.3.2 Sampel Penelitian	42
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	45
3.4.1 Jenis Data Penelitian	45
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Metode Analisis Data Penelitian	47
3.5.1 Uji Measurment Model (<i>Outer Model</i>).....	48
3.5.2 Uji Validitas	48
3.5.3 Uji Reliabilitas	49
3.5.4 Uji Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	54
4.1.2 Sejarah Kecamatan Anggrek	54
4.1.3 Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Anggrek.....	55
4.1.4 Struktur Kecamatan Anggrek.....	57
4.2 Gambaran Umum karakteristik Responden.....	58
4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian	58
4.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
4.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	60
4.3.1 Measurment Model (<i>Outer Model</i>)	60
4.3.2 Uji reabilitas	66

4.4 Analisis Uji Structural Model (Inner Model)	67
4.5 Uji Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	68
4.6 Pembahasan	71
4.6.1 Pengaruh Kesesuaian kompensasi Terhadap kecurangan	71
4.6.2 Pengaruh Kesesuaian kompensas Terhadap moralitas	73
4.6.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap kecurangan melalui Moralitas	76
4.6.4 Hubungan antara Grand teory dengan hasil penelitian.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3.1 Model Analisis Jalur (Path Analysis).....	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Anggrek.....	58
Gambar 4.2 Estimasi Model Awal Penelitian.....	61
Gambar 4.3 Perubahan Outer Model Re-Estimasi.....	63
Gambar 4.4 Uji Instrumen Data.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Operasioanl Variabel X.....	42
Tabel 3.2 Operasional Variabel Y.....	42
Tabel 3.3 Responden.....	45
Tabel 3.4 Pengukuran Skala Likert.....	48
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner	59
Tabel 4.2 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.3 Kriteria Responden Berdasarkan Pendidikan.....	60
Tabel 4.4 Loading Factor atau Outer Loading	62
Tabel 4.5 Loading Factor atau Outer Loading.....	64
Tabel 4.6 Fornell Criterion Discriminant Validity.....	65
Tabel 4.7 Everage Variance Extracted (AVE)	66
Tabel 4.8 Composite Reability.....	67
Tabel 4.9 Inner Model.....	67
Tabel 4.10 Path Coefisien Hipotesis 1	69
Tabel 4.11 Path Coefisien Hipotesis 2.....	70
Tabel 4.12 Path Coefisien Hipotesis 3.....	70
Tabel 4.13 Hipotesis Hasil Penelitian	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outer Loading.....	90
Lampiran 2 R Square	90
Lampiran 3 Validitas Disrkiminant Konstruk.....	90
Lampiran 4 Valididitas Diskriminant.....	90
Lampiran 5 Estimasi Model Awal Penelitian & Perubahan Outer Model Re-Estimasi ...	98
Lampiran 6 Tabulasi Data.....	104

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan (*fraud*) sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja menggunakan sumber daya internal secara tidak wajar dan salah dalam menyajikan keuntungan pribadi. kecurangan dapat terjadi jika pernyataan atau pengungkapan palsu, fakta material yang menghasut seseorang untuk bertindak, dan niat untuk menipu, ketergantungan yang sah, dan keberadaan korban (Gazali 2021).

Jenis kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintah yaitu korupsi. Dilihat dalam konteks kelembagaan kasus korupsi banyak dilakukan di pemerintah daerah yakni pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Hal ini membuktikan bahwa *fraud* tidak hanya terjadi di pemerintah pusat namun juga terjadi pada pemerintah daerah termasuk pemerintahan desa. Banyak kasus kecurangan terjadi di pemerintah desa, hingga melibatkan kepala desanya. Banyaknya kasus kecurangan menyebabkan peneliti ingin mengetahui faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

*Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)*mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum atau tata peraturan yang berlaku dengan ditandai tindakan tidak jujur untuk penggelapan atau pelanggaran kewenangan. Tindakan ini tidak terbatas pada ancaman kekerasan dengan kekuatan fisik yang digunakan

oleh individu atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak tertentu yang melakukan fraud.(ACFE,2021). *International Auditingand Assurance Standard Board (IAASB)* sebagai bagian dari *Internasional Federation of Accountants (IFAC)* mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang bukan merupakan bentuk kelalaian atau kurangnya kompetensi dari seseorang melainkan tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu yang memiliki kewenangan seperti manajemen, pegawai, ataupun pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan tidak sah dan tidak jujur (IFAC, 2020).

Dari definisi terkait *fraud* diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tata aturan dimana pihak yang melakukan *fraud* berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian untuk pihak lain. Tindakan *fraud* ini dapat terjadi pada pihak manapun terutama pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan.

Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), tingkat tindak pidana korupsi di level desa menunjukkan tren meningkat dan konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar. Hal ini berlanjut di tahun 2022, dengan jumlah 155 kasus korupsi pada sektor desa (26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum), 133 kasus berhubungan dengan Dana Desa, dan 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa.

Desa adalah miniatur dari pemerintahan otonomi di Indonesia. Kepala Desa bersama aparaturnya memiliki tugas untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Desa tidak hanya melaksanakan belanja, tetapi juga menghimpun pendapatan dan semua siklus pengelolaan keuangan yang ada di desa. Mulai proses penyusunan anggaran yang memerlukan persetujuan dewan perwakilan desa, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat di desa. Menurut Sari dkk (2020), kepala desa adalah orang yang paling sering terlibat dalam korupsi dana desa. Banyak kasus terjadi di beberapa wilayah karena korupsi, kewenangan dan jabatan, pelanggaran, dan sejumlah kasus pidana lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakdamaian dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan dan pemborosan anggaran dan keuangan .

Seseorang rentan melakukan perbuatan korupsi adalah yang begitu dekat atau terlibat langsung terhadap proses pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang besar. Beberapa peristiwa korupsi Dana Desa yang terjadi di Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara yang terlihat adanya potensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah tertuju pada Kepala Desa serta Aparat Desa sebab mereka itulah pejabat yang memiliki akses langsung terhadap proses pengelolaan anggaran. Fenomena tentang kecurangan ini jelas menimbulkan kegundahan bagi masyarakat sebab praktik penyalahgunaan anggaran ini bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Tuankotta (2014) bahwa praktik *fraud* atau penyalahgunaan anggaran yang

terungkap sekalipun secara absolut besar, namun jika dibandingkan dengan seluruh praktik *fraud* yang sebenarnya terjadi akan *relative* lebih kecil. Kejahanan di Kabupaten Gorontalo Utara didominasi oleh kecurangan dana desa, namun di era globalisasi yang sudah maju masih terdapat masyarakat yang percaya dengan hal-hal yang dijanjikan para pelaku.

Sebagai salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pun tidak pernah luput dari kecurangan dana desa. Kecurangan tentang dana desa yang terjadi di Kecamatan Anggrek menjadi perhatian publik. Penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Langge Kecamatan Anggrek oleh mantan Kepala Desa yang ditetapkan sebagai korupsi dana desa berinisial (AA) periode 2019 hingga 2024 dan disangka lewat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana 4 tahun. Atas perbuatanya tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara tahun 2019 sejumlah Rp 93 juta dan pada tahun 2020 kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 289 juta. (<https://sulut.inews.id/berita/kejari-gorontalo-utara-tahan-kades-tersangka-korupsi-dana-desa>).

Adapun faktor yang memengaruhi kecurangan (*fraud*) yaitu kesesuaian kompensasi, dimana dipengaruhi oleh besar tidaknya tekanan. Tekanan (*Stimulus*) adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan keuangan maupun non keuangan, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi.

Kesesuaian kompensasi merupakan suatu keadaan dimana karyawan dalam sebuah perusahaan mendapatkan hasil dari sesuatu yang telah ia kerjakan. Kompensasi dapat berupa uang, barang langsung ataupun tidak langsung. Kecurangan akan terjadi jika para penerima kompensasi merasa jika kompensasi yang diberikan tidak cukup dengan yang ia harus terima. Keadaan ini tentu saja akan menimbulkan keinginan para penerima kompensasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu dengan cara melakukan keurangan. Kompensasi dapat dibagi menjadi dua yaitu, kompensasi *financial* dan kompensasi *non financial*. Kompensasi *financial* contohnya seperti gaji, upah dan lain sebagainya. Kompensasi *non financial* contohnya seperti pujian, kenaikan jabatan dan lain sebagainya

Hal yang tidak kalah penting dalam mencegah kecurangan adalah penegakan hukum dimana dengan kesadaran dalam menaati peraturan dengan baik dapat meminimalisir adanya kecurangan (wulandari, 2016), serta pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan pegawai dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mencegah tindakan kecurangan (Chandra & Ikhsan, 2015).

Seseorang yang merasa kurang cukup terhadap imbalan yang diperoleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan juga merupakan motivasi individu untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Kompensasi yang layak berakibat pada kepuasan terhadap keperluan hidup, sehingga tindakan kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisir (Chandra & Ikhsan, 2015). Pemberian kompensasi yang memadai dapat mempengaruhi tindakan dan kinerja pegawai sehingga dapat mengurangi

tindakan kecurangan (*fraud*) (Adi et al., 2016). Hasil yang berbeda dikemukakan oleh penelitian Adinda & Ikhsan (2015) yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi tidak dapat mengurangi tindakan kecurangan (Adinda and Ikhsan 2015).

Dengan kompensasi yang sesuai, perilaku kecurangan dapat berkurang. Kunci untuk memotivasi seseorang untuk berprilaku sedemikian rupa sehingga memajukan cita-cita suatu organisasi terletak pada cara pemberian insentif atau kompensasi oleh organisasi tersebut. Pemberian kompensasi kepada karyawan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara dan menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya tanpa kompensasi yang cukup (sesuai) karyawan yang ada akan sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan (Sanuari, 2014). Dewi et al (2017) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh *negative* terhadap kecurangan. Artinya bahwa jika karyawan diberikan kompensasi yang tinggi, maka kemungkinan terjadi kecurangan akan semakin rendah, karena apabila terjadi ketidaksesuaian kompensasi, maka menyebabkan timbulnya ketidakpuasan yang menyebabkan terjadinya mogok kerja dan kecurangan.

Moralitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan. Organisasi atau instansi juga memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral dari manajemen organisasi mempengaruhi terjadinya perilaku kecurangan (*fraud*). Semakin buruk moralitas dari aparat maka kemungkinan terjadi perilaku kecurangan akan semakin besar pula Moral yang buruk dari aparat diasumsikan dapat mendorong aparat berlaku curang dalam akuntansi. Kecurangan sangat

berkaitan dengan tingkat Moralitas aparat tersebut karena hal tersebut merupakan perilaku yang ilegal.

Moral adalah adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral sendiri dapat diartikan sebagai baik buruk nya sikap atau perilaku seseorang. Hal ini dapat dilihat apabila seseorang dikatakan bermoral maka ia akan dinilai memiliki nilai positif berdasarkan penilaian masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki moral biasa disebut amoral, orang ini biasanya berperilaku buruk dan mendapatkan pandangan negatif dari penilaian orang lainnya ataupun masyarakat.

Moralitas merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan dampak bagi pengelolaan desa. Sedangkan bermoral merupakan pertimbangan baik dan buruk, berakhhlak baik. Iyanarachchi (2015) menyatakan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etnis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Pihak yang melakukan kecurangan mereka tidak sadar akan rendahnya moral, yang seharusnya moralitas itu menjadi salah satu sikap yang dimiliki para anggota organisasi baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap kecurangan (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap moralitas (X_2) pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?
3. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap kecurangan (Y) melalui moralitas (X_2) pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap moralitas pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan melalui moralitas pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Bisa memberikan manfaat dan untuk menambah wawasan dalam mengembangkan hasil penelitian untuk penelitian selanjutnya khususnya membahas mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan pada pemerintah desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berharap dapat menjadikan referensi dan acuan bagi para praktisi dalam menjalankan proses yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) dan memotivasi untuk dapat mengurangi akan terjadinya kecurangan yang terjadi baik didesa maupun dikota.

3. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti bisa memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dan teori dalam bidangnya melalui hasil dan temuan penelitiannya. Dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi *references* serta disempurnakan untuk tertarik melakukan penelitian sejenisnya.

BAB II

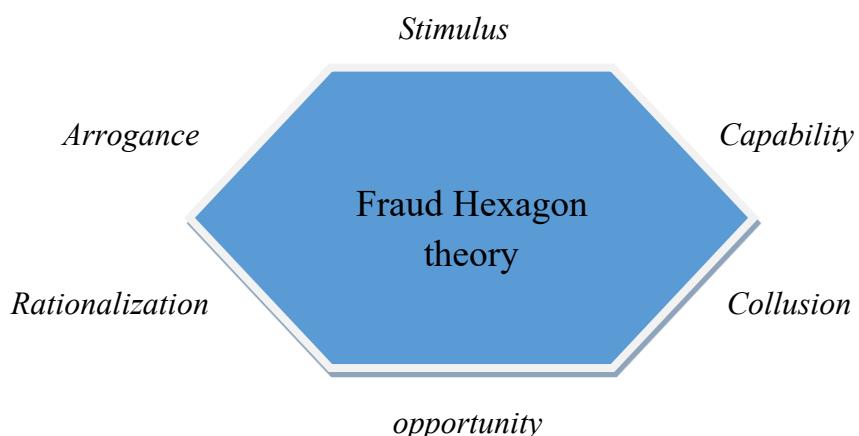
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Theory Hexagon Fraud

Theory fraud hexagon merupakan teori yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), dimana faktor kolusi ditambahkan sebagai salah satu faktor terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Pada awalnya untuk mengetahui Tindakan seseorang saat melakukan kecurangan, awalnya yang didasari dengan *Fraud Triangle* yang terdiri dari pressure (tekanan), rationalization (rasionalisasi) dan opportunity (peluang). Seiring berjalananya waktu, hal yang mendasari tindakan kecurangan telah berubah menjadi *Fraud Diamond* yang memiliki empat point utama, *Fraud Pentagon* yang bertambah menjadi lima point, hingga sampai saat ini tercipta *Fraud Hexagon* yang terdiri dari enam point dimana model fraud hexagon ditemukan oleh Geogios L. Vousinas pada tahun 2016 (Desviana et al., 2020).

Keenam poin dalam fraud hexagon yaitu sebagai berikut :



1. Stimulus (*Pressure*)

Preassure atau tekanan yaitu insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan tersebut mencakup hampir di semua hal seperti gaya hidup, tuntutan ekonomi dan lainnya baik dalam hal keuangan atau non keuangan (Listiana, 2012). Sementara Albrech 2008 dalam (Fajria, 2019) tekanan itu sifatnya tidak nyata karena hanya dirasakan oleh individu itu sendiri. Tekanan juga diartikan sebagai kondisi yang berat saat seseorang yang menghadapi kesulitan, seseorang merasa tertekan serta tidak dapat diceritakan kepada orang lain (Setiyono, 2019).

Pada umumnya, tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah *financial*, tetapi banyak juga yang terdorong melakukan kecurangan karena keserakahan. Penggelapan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya serta kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep ini disebut Donald R. Cressy sebagai *perceived non-shareable financial need*. Menurut penelitian Cressey dalam (Tuanakotta, 2016) *non-shareable problems* dibagi dalam enam kelompok, sebagai berikut: 1) *violation of ascribed obligation*, 2) *problems resulting from personal failure*, 3) *business reversals*, 4) *physical isolation*, 5) *status gaining*, dan 6) *employer-employee elation*.

2. Ego (*Arrogance*)

Arrogance yaitu sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara

pribadi. Hal ini disebabkan seseorang merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya (Desviana et al., 2020).

3. Kapabilitas (*Capability*)

Hal ini menunjukkan seberapa besar daya dan kapasitas dari suatu pihak untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan. Misalnya, menggambarkan dengan jelas saat terjadinya perubahan direksi yang merupakan terciptanya wujud *conflict of interest* (Saro & Nugroho, 2020).

4. Pemberanakan (*Rationalization*)

Pemberanakan yaitu seseorang mencari pemberanakan sebelum melakukan kejahatan bukan sesudahnya. Pemberanakan diperlukan oleh pelaku agar tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah melakukan kejahatan maka rasionalisasi tidak diperlukan lagi. Listiana, 2012 menyatakan Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud* yang susah untuk diukur. Mereka yang selalu berbuat tidak jujur, maka akan sangat mudah untuk melakukan rasionalisasi. Sikap rasionalisasi adalah faktor terakhir dalam *fraud* yang diartikan sebagai sikap melakukan pemberanakan terhadap perilaku yang tidak etis yang merupakan hal yang wajar karena adanya sikap pemberanakan dari individu (Fajria, 2019).

5. Peluang (*Opportunity*)

Peluang menjadi hal penting bagi individu dapat melakukan kecurangan. (Fajria, 2019). *Opportunity* yaitu adanya peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau

penyalahgunaan posisi atau otoritas (Listiana, 2012). Organisasi seharusnya mampu untuk membuat suatu prosedur pengontrol dan tata kelola yang membuat setiap karyawan organisasi tidak memiliki celah untuk melakukan *fraud* serta untuk perusahaan dalam mendeteksi secara dini jika terjadi *fraud*.

Pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang untuknya melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh orang lain. Cressey berpendapat ada 8 dua komponen tentang peluang melakukan kejahatan yaitu *general information* dan *technical skills*. Pertama, *general information* adalah pengetahuan bahwa kedudukan kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang didengar atau dilihat. Kedua, *technicall skill* yaitu keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan.

6. Collusion

Collusion yaitu perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik, misalnya menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya. Menurut Voussinas (2019).

2.1.2 Kecurangan (*Fraud*)

2.1.2.1 Pengertian Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) adalah setiap tindakan yang melanggar hukum yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

Ancaman kekerasan atau kekerasan fisik tidak menjadi dasar tindakan ini. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi dengan tujuan mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa; menghindari pembayaran jasa atau kerugian; atau untuk menjaga keuntungan bisnis pribadi.

Kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang didasari oleh adanya kecerdikan dari individu itu sendiri yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dengan tindakan yang salah dan juga tanpa mementingkan pihak lain dan lingkungan disekitarnya Kingsley, 2015 dalam (Fajria, 2019).

Menurut Albrecht (2017), "*Fraud* adalah sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah".

Kecurangan sebagai tindakan yang disengaja oleh individu di antara manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau illegal, Cressey 2015.

Kecurangan termasuk kejutan, tipu muslihat, atau teknik licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Kecurangan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia. Kecurangan atau *fraud* adalah penipuan yang terdiri dari salah satu dari hal-hal berikut:

1. Representasi.
2. Mengenai sesuatu yang bersifat material.

3. Sesuatu yang tidak benar.
4. Hal secara sengaja atau serampangan dilakukan kemudian.
5. Dipercaya.
6. Dapat ditindaklanjuti.
7. Menanggung kerugian.

2.1.2.2 Jenis-jenis kecurangan

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) mengkategorikan kecurangan menjadi tiga jenis yaitu:

1) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset melibatkan penggunaan aset atau properti milik perusahaan atau pihak ketiga. Bentuk kecurangan ini mudah dikenali karena terlihat atau terukur dan dapat dihitung (nilai tertentu). Penyelewengan aset berupa uang tunai maupun non tunai. Penyalahgunaan aset tunai terjadi dalam bentuk penggelapan uang tunai atau cek dari pelanggan. Di sisi lain, menutup-nutupi aset material dapat terjadi dalam bentuk penggunaan fasilitas desa untuk keuntungan pribadi.

2) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement adalah suatu tindakan manipulasi keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pejabat dan pimpinan perusahaan serta instansi pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau *window dressing*.

3) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah jenis penipuan yang paling umum terjadi di negara-negara berkembang dimana penegakan hukumnya lemah dan kesadaran akan tata kelola pemerintahannya buruk, sehingga integritasnya sangat diperhatikan. Penipuan jenis ini sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau benturan kepentingan, Penyuapan, pengambilan keuntungan ilegal dan pemerasan ekonomi.

2.1.2.3 Faktor-faktor kecurangan

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan terdiri dari tiga gal yang sering disebut *The Fraud Triangle*. Layaknya sebuah segitiga yang saling berhubungan antara sudut dengan sudut lainnya, ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya tekanan atau dorongan untuk melakukan kecurangan.

Manajemen atau pegawai melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan karena berada dibawah tekanan. Misalnya, mencapai target laba tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

2. Adanya peluang atau kesempatan untuk melaksanakan kecurangan.

Seseorang dalam instansi akan melakukan kecurangan apabila ia merasa yakin bahwa dirinya dapat menghindari pengendalian intern atau sistem dianggapnya tidak akan menemukan kecurangan yang dilakukannya.

3. Adanya rasionalisasi atau alasan pemberian

Seseorang didalam instansi yang melakukan tindakan kecurangan tersebut membuat pemberian terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan yang dilakukannya. Artinya, orang yang melakukan kecurangan tersebut memiliki sikap, karakter atau nilai-nilai etika tertentu yang membuatnya secara sadar dan paham betul untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

2.1.2.4 Tujuan kecurangan

Kecurangan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan tujuan kecurangan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut beberapa tujuan kecurangan yaitu :

1. Keuntungan yaitu banyak kecurangan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak layak diterima, seperti dalam kasus penipuan, pencurian, atau penghindaran pajak.
2. Hukuman yaitu kecurangan juga bisa bertujuan untuk menghindari konsekuensi hukum atau administratif, seperti dalam kasus pelanggaran hukum yang sengaja ditutupi.
3. Peringkat atau status yaitu beberapa orang melakukan kecurangan untuk memperoleh peringkat dan status yang lebih tinggi, seperti dalam konteks akademis atau profesional.
4. Kekuasaan atau kontrol yakni kecurangan dilakukan untuk memperoleh kekuasaan atau kontrol yang lebih besar, baik dalam instansi maupun dalam hubungan pribadi.
5. Menghindari kerugian yaitu kecurangan dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang signifikan, baik finansial maupun reputasi.

6. Mempertahankan posisi yaitu kecurangan yang dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan posisi dalam instansi.

2.1.2.5 Dampak Kecurangan

Beberapa dampak kecurangan yang ada didalam instansi yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian finansial yaitu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu atau negara. Misalnya, kasus penipuan yang bisa menimbulkan kerugian yang besar.
2. Kerusakan reputasi yaitu yang dapat merusak reputasi individu yang terlibat. Reputasi tercemar dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas.
3. Dampak sosial yaitu kecurangan yang dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, termasuk penurunan kepercayaan terhadap institusi dan sistem yang ada.

2.1.2.6 Indikator Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE 2000) indikator kecurangan yaitu:

1. Laporan keuangan (*Financial statement*) dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau non finansial.

2. Penyalahgunaan aset (Aset misappropriation) dapat digolongkan kedalam ‘kecurangan kas’ dan ‘kecurangan atas persediaan dan aset lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang.
3. Korupsi (*Corruption*) adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi kedalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dan pemerasan (*economic extortion*).
4. Kecurangan komputer (*computer fraud*) adalah sebagai berikut : 1). Menambah, menghilangkan atau mengubah masukan atau memasukkan data palsu, 2). Salah memposting atau memposting sebagian transaksi saja.

2.1.3 Audit

Menurut ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concept*) Auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk dapat menentukan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan untuk menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Untuk audit yang termasuk dalam sektor pemerintahan, auditor yang bertanggung jawab untuk melakukan audit keuangan pada organisasi pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-undang

Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

2. Auditor Internal Pemerintahan atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen/LPND dan Badan Pengawasan Daerah.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Seksi 316, kecurangan merupakan konsep hukum yang luas. Kepentingan auditor secara khusus terkait dengan kecurangan yang menyebabkan laporan keuangan yang salah. Auditor mempertimbangkan kecurangan dalam audit laporan keuangan dalam dua jenis salah saji, yaitu:

1. Salah saji adalah hasil dari kecurangan dalam laporan keuangan, di mana jumlah atau pengungkapan dimasukkan secara sengaja ke dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi penggunanya. Tindakan berikut dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan:
 - 1) Manipulasi, memalsukan, atau mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya, yang berfungsi sebagai sumber data untuk penyajian laporan keuangan.
 - 2) Laporan keuangan yang salah menampilkan peristiwa, transaksi, atau informasi penting.

- 3) Salah menggunakan prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi, penyajian atau pengungkapan.
2. Salah satu konsekuensi dari penyalahgunaan atau penggelapan aktiva, yang sering disebut sebagai penyalahgunaan atau penggelapan, adalah pencurian aktiva entitas, yang menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi umum Indonesia. Perampokan terhadap aset entitas dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti menipu tanda terima barang atau uang, mencuri aktiva, atau membuat entitas harus membayar untuk barang atau jasa yang tidak diterima. Perampokan terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau menyesatkan dan dapat melibatkan manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

2.1.4 Kesesuaian Kompensasi

2.1.4.1 Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikomstisikan atau dianggap sebagai balas jasa/ekuivalen. Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap perilaku karyawan, seseorang cenderung akan berperilaku curang untuk memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Biasanya karyawan melakukan kecurangan karena tidakpuasan atau kekecewaan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah mereka kerjakan.

Menurut Riniwati (2016) kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, kompensasi kerja adalah kemampuan

kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kompensasi didefinisikan sebagai keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari pekerjaan seseorang di dalam sebuah organisasi. Kompensasi dapat berupa uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya. Menurut Putri (2016), kompensasi sering disebut sebagai penghargaan, dan dapat didefinisikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Dengan pemberian kompensasi yang sesuai, diharapkan kecurangan dapat diminimalisir. Seseorang diharapkan memiliki kepuasan dari kompensasi yang diberikan tersebut dan tidak melakukan tindakan penipuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Kesesuaian kompensasi adalah kecocokan dan kepuasan karyawan/pegawai/ pekerja atas imbalan jasa yang diterima karyawan dari perusahaan tersebut, baik berupa uang ataupun barang. Dan dengan adanya kesesuaian kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisasikan tindakan kecurangan didalam instansi (Hasibuan, 2016).

Kompensasi menurut Hasibuan (2003) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang di berikan ke perusahaan.

2.1.4.2 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan

Seseorang dapat melakukan suatu tindakan kecurangan dikarenakan masalah akuntan ekonomi dan sosial yang terjadi dalam hidupnya. Ketika seseorang

telah merasa kekurangan dengan pendapatan yang ia terima maka seseorang tersebut akan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Untuk menanggulangi terjadinya kecurangan maka perusahaan akan memberikan kompensasi terhadap karyawannya. Namun ada beberapa orang yang terkadang merasa tidak puas dengan imbalan yang di berikan oleh perusahaan dan melakukan hal-hal yang dapat memberikan tambahan keuntungan terhadapnya dan berdampak terhadap laporan keuangan.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Kompensasi

Kompensasi akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan jika di kelola dengan baik, misalnya untuk mencapai tujuan dan menjaga karyawan dengan baik, tetapi jika kompensasi tersebut dirasa tidak cukup (sesuai dan adil) karyawan mungkin akan meninggalkan perusahaan. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu:

1) Kompensasi yang bersifat finansial

Kompensasi financial dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Kompensasi langsung, contohnya seperti pembayaran karyawan berupa upah, gaji, bonus dan komisi.
2. Kompensasi tidak langsung atau benefit contohnya seperti liburan, asuransi, kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

2) Kompensasi yang bersifat non finansial

Kompensasi yang bersifat non financial contohnya seperti pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja, produktivitas dan kepuasan dari karyawan, pujian, menghargai diri sendiri, dan promosi jabatan.

2.1.4.4 Tujuan dan Manfaat Kompensasi

Kompensasi dalam suatu instansi harus diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sistem yang baik. Tujuan dan manfaat kompensasi antara lain :

1. Memperoleh personil yang berkualifikasi
2. Mempertahakan karyawan yang ada
3. Menjamin keadilan
4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan
5. Mengendalikan biaya
6. Mengikuti aturan hukum

Adapun pendapat lain,tujuan kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah.

Kesesuaian kompensasi mengacu pada jumlah uang yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan (Adam, 2022). Untuk memaksimalkan keuntungan pribadi,seseorang sering bertindak tidak etis. Karyawan melakukan kecurangan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka tidak puas atau kecewa dengan hasil atau bayaran yang mereka terima untuk pekerjaan mereka. Kompensasi yang tepat seharusnya mengurangi insentif karyawan untuk melakukan kecurangan.

Kompensasi merupakan bentuk apresiasi berupa fisik maupun non fisik atas prestasi yang diberikan kepada karyawan dalam suatu perusahaan atas kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi diberikan dengan

tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi dan efektivitas produksi.

2.1.4.5 Indikator Kompensasi

Menurut afandi (2018) mengemukakan bahwa indikator dari kompensasi yaitu :

1) Upah dan gaji

Upah berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis bayaran yang kerap kali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan.

Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, tahunan.

2) Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi diatas atau diluar gaji atau upah yang diberikan oleh instansi.

3) Tunjangan

Tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung instansi, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

4) Fasilitas

Fasilitas adalah manfaat atau fasilitas yang diberikan kepada seseorang, seperti mobil instansi, tempat parkir khusus, keanggotan, atau akses ke pesawat instansi yang dimiliki oleh pegawai. Fasilitas dapat mewakili jumlah kompensasi yang signifikan, terutama bagi eksekutif dengan gaji yang tinggi.

2.1.5 Moralitas

2.1.5.1 Pengertian Moralitas

Salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya kecurangan adalah moralitas. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Sangat dibutuhkan moralitas yang baik bagi setiap individu dalam memerangi pencegahan kecurangan. Kecurangan dapat dicegah dengan baik apabila individu memiliki tingkatan moral yang tinggi, sehingga individu tersebut dapat menerima dan menjalankan peraturan yang ada sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Begitupun sebaliknya, jika individu tersebut memiliki tingkatan moral yang rendah, maka individu tersebut cenderung untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan yang menurut individu tersebut benar, sehingga tidak dapat menaati dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya (Lestari & Ayu, 2021).

Moralitas adalah ajaran atau pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk menjadikan manusia di dunia memiliki ahlak baik. Menurut Bertens dalam (Ningsih 2020) etika pada dasarnya berarti sama dengan moral. Ethis tindakan berarti bahwa aspek moral adalah perilaku baik dan buruk orang. Moral dibedakan menjadi dua yaitu objektif dan subjektif. Moral objektif sebagai norma yang melekat pada setiap tindakan yang pada dasarnya baik atau buruk dan benar atau salah. Sedangkan moral subjektif adalah jenis moral yang menganggap tindakan dipengaruhi oleh pengetahuan kriminal.

2.1.5.2 Pengaruh Moralitas Terhadap Kecurangan

Perbuatan curang akan terjadi jika di dalam perusahaan seorang karyawan tidak memiliki kepedulian terhadap suatu perbuatan yang salah, bahkan perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa atau dengan sengaja berpura - pura tidak mengetahui perbuatan tersebut. Suatu kepedulian ini sangat penting agar dapat membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral menjadi pemicu tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi (Aranta 2013).

2.1.5.3 Jenis-Jenis Moralitas

Moralitas terhadap pencegahan kecurangan, seperti penelitian (Aprilia & Yuniasih, 2021) dan (Islamiyah et al., 2020) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan. Moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Moral murni merupakan moral yang memang ada pada setiap manusia. Moral murni seringkali disebut dengan hati nurani.
- 2) Moral terapan merupakan moral yang dapat dipelajari dan biasanya didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan lain-lain.

2.1.5.4 Tujuan Moralitas

Moralitas adalah untuk memandu perilaku individu dan masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebaikan. Berikut beberapa tujuan moralitas yaitu :

1. Pembangunan karakter yaitu membantu individu mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab dan empati.
2. Keharmonisan sosial yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil dengan mempromosikan perilaku yang saling menghormati dan menghindari konflik.
3. Peningkatan kualitas hidup yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan mempromosikan perilaku yang mendukung kesejahteraan pribadi dan sosial.

2.1.5.5 Manfaat Moralitas

Moralitas merujuk pada prinsip dan norma yang membimbing perilaku manusia untuk bertindak dengan cara yang dianggap baik dan benar. Berikut beberapa manfaat moralitas yaitu :

1. Kepercayaan dan keamanan yakni dengan mengikuti norma moral, individu dapat membangun kepercayaan satu sama lain, yang penting untuk hubungan interpersonal dan transaksi sosial.
2. Pengembangan karakter yakni moralitas berperan dalam pembentukan karakter individu. Prinssip moral mengarahkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Stabilitas sosial yakni masyarakat yang menjunjung tinggi moralitas cenderung lebih stabil karena norma-norma moral menciptakan kerangka kerja yang memandu perilaku dan menjaga ketertiban sosial.

2.1.5.6 Indikator Moralitas

Semakin tinggi penalaran moral maka, akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan. Menurut Abdul Majid (2015), indikator moralitas adalah sebagai berikut :

1) Jujur

Tanpa kejujuran manusia tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tidak jujur berarti tidak seiya sekata yang berarti kita belum sanggup mengambil sikap yang lurus. Orang yang tidak lurus tidak menggunakan dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan akan diharapkan orang lain.

2) Disiplin

Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawab. Disiplin juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri, mengikuti aturan, dan menjaga konsistensi.

3) Tanggungjawab

Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, serta melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri.

4) Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok.

2.1.6 Desa

Desa yaitu suatu tempat dimana warga tinggal dengan memiliki beragam suku didalamnya terdapat kerumununan orang yang tinggal dikalangan baik anak-anak, remaja, dewasa yang sudah menikah pekerja, buruh, PNS bukan hanya itu didesa juga disediakan kepala desa dan aparat desa yang fungsinya untuk menjaga warga dan mengkoordinis semua yang menjadi tanggung jawab didesa tersebut. Selain itu desa mempunyai fungsi untuk menjaga masyarakat itu sendiri berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 mengenai pemerintahannya sendiri.

Menurut Unang Sunarjo, desa merupakan kesatuan masyarakat yang menetap dan berdasar pada adat dan hukum adat. Kesatuan ini hidup dalam batas wilayah yang pasti, memiliki ikatan yang kuat karena memiliki kepentingan finansial dan politik yang sebanding, memiliki kontrol karena musyawarah bersama dan memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa adalah kesatuan jaringan hukum yang memiliki hambatan teritorial yang sah untuk mengubah dnan mengontrol urusan kekuasaan, kepentingan masyarakat, hak tempat awal, dan/atau konvensional yang diidentifikasi dan dihormati dalam perangkat kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.6.1 Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa

tersebut. Pengelolaan dana desa sebagaimana pendapat yang dikemukakan Thomas (2013) dalam Hulinggi dkk (2020) bahwa adanya suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi dalam mencapai tujuan tertentu.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pemdapatkan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.6.2 Pemerintah Desa

Perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting didalam mengembangkan kemajuan desa. Aparat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa. Aparat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Indrianasari, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor.113 Tahun 2014, tugas aparatur desa adalah menjaga kepentingan negara dan keinginan rakyat dalam bentuk NKRI. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, aparatur dusun terdiri dari kepala dusun dan perangkat dusun lainnya, dan memiliki kemahiran dalam aspeknya, tanggung jawab dan berkelakuan baik saat mengelola dusun, memberikan pemberian kepada warga dusun, mengelola dusun, dan memberikan

pembenahan kepada warga dusun, sementara perangkat dusun lainnya melaksanakan tugas atasan dusun dengan melakukan tugas tersebut.

2.1.6.3 Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan fungsi dan tugas pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tugas pokok kepala desa yaitu : 1). Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, 2). Pemberdayaan masyarakat, 3). Pelayanan masyarakat, 4). Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, 5). Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi

2.1.6.4 Tujuan Dibentuknya Pemerintah Desa

Pemerintah desa dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Berikut adalah beberapa tujuan utama pembentukan pemerintah desa yaitu :

1. Pelayanan publik yaitu menyediakan layanan dasar dan fasilitas umum kepada masyarakat desa, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
2. Pemberdayaan masyarakat yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan desa.
3. Pelestarian budaya dan tradisi yaitu menjaga dan melestarikan adat istiadat serta budaya lokal yang merupakan bagian penting dari identitas desa.

4. Penegakan hukum dan ketertiban yaitu menegakan aturan dan hukum yang berlaku ditingkat desa untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
5. Pengelolaan sumber daya yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan untuk kepentingan desa.
6. Pembangunan sosial yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program sosial dan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang di gunakan peneliti, yang terdiri dari beberapa tahun yang berbeda, akan di jabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Shelby defiany aluo (2017)	Pengaruh kesesuaian kompensasi,moralitas manajemen dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan kontruksi manado	Metode kuantitatif	Kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2.	Nurma haranij unia (2016)	Pengaruh moralitas aparat,kesesuaian kom pensasi,dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi empiris pada satuan kerja perangkat	Metode kuantitatif	Berdasarkan hasil peneltian moralitas aparat dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecuangan.

		daerah kabupaten kampar)		
3.	Putu purnama seri (2017)	Moralitas aparat, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan kecenderungan kecurangan akuntansi	Metode kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian moralitas aparat dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap keuangan.
4.	Marta nasrani gee (2021)	Pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja pegawai pada kantor camat teluk dalam kabupaten nias selatan	Metode kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja karyawan.

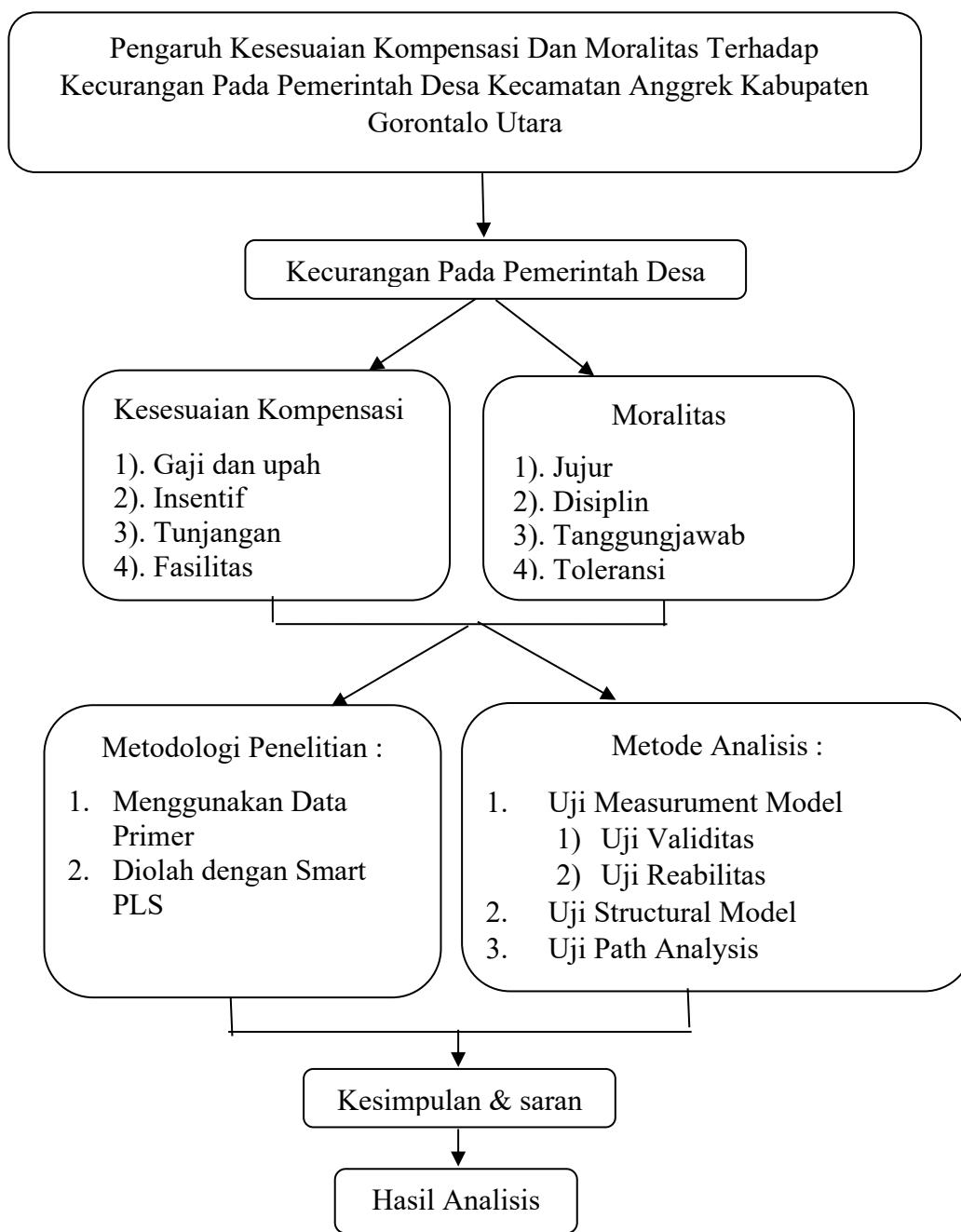
Yang membedakan penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan *path analysis* dengan metode *cluster sampling* untuk mengukur pengaruh kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan pada pemerintah desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian terdahulu juga menggunakan metode kuantitatif tetapi diantaranya menggabungkan variable tambahan seperti asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, ketataan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi serta mengkaji konteks yang berbeda, sehingga penelitian ini menggali lebih spesifik lagi tentang kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan. Selain itu, objek atau Lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda, sehingga dapat memberikan sudut pandang yang baru terkait topik yang sama.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan pada pemerintah desa, variabel independen terdiri dari kesesuaian kompensasi dan moralitas yang mencakup tentang pengetahuan dan pemahaman gaji/upah seseorang; serta moralitas yang berkaitan dengan perilaku seseorang; kedua variabel ini akan dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap kecurangan pada pemerintah desa sebagai variabel dependen.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarluaskan kepada pemerintah desa. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Data yang akan dikumpul akan diolah menggunakan Smart PLS untuk analisis statistik. Analisis data yang digunakan menggunakan *Path analysis* untuk menguji hipotesis dan mengukur hubungan antar variabel-variabel tersebut.

Selain itu, uji measurement model (*Outer model*) untuk memastikan dan mengetahui hubungan variabel dengan indikator yang akan diuji melalui uji validitas dan uji reabilitas, dan uji structural model (*Inner model*) untuk mengetahui sebab-akibat diantara hubungan antar variabel. Melalui kerangka pemikiran ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian kompensasi dan moralitas pada pemerintah desa.



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi (X1) Terhadap Kecurangan (Y)

Kompensasi didefinisikan sebagai keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari pekerjaan seseorang di dalam sebuah organisasi. Kompensasi dapat berupa uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya. Menurut Putri (2016), kompensasi sering disebut sebagai penghargaan, dan dapat didefinisikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti dkk (2023) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya, semakin sesuai atau layak kompensasi yang diterima pegawai, justru semakin tinggi kecenderungan mereka untuk melakukan kecurangan. Hasil yang positif ini bukan berarti kompensasi yang baik mendorong kecurangan secara langsung, melainkan ada kemungkinan bahwa Pegawai merasa memiliki posisi tawar lebih tinggi karena mereka sudah dibayar sesuai, sehingga merasa aman atau nyaman untuk berbuat curang. Kepuasan terhadap kompensasi bisa menciptakan rasa berkuasa atau tidak tersentuh, yang dapat mengurangi rasa takut terhadap risiko atau hukuman. Meskipun kompensasi sesuai, jika tidak ada sistem audit atau pemantauan ketat, maka potensi kecurangan tetap tinggi. Kurangnya etika kerja atau moralitas individu. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan mengungkap bahwa kompensasi yang sesuai maka akan mencegah fraud.

H₁ : Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kecurangan (Y) pada pemerintah desa di Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

2.4.2 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi (X1) Terhadap Molitas (X2)

Moralitas adalah ajaran atau pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk menjadikan manusia di dunia memiliki ahlak baik. Menurut Bertens dalam (Ningsih 2020) etika pada dasarnya berarti sama dengan moral. Etis tindakan berarti bahwa aspek moral adalah perilaku baik dan buruk orang. Moral dibedakan menjadi dua yaitu objektif dan subjektif.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Purnama Dewi & Putu Dian Puspita Rani (2017) Aparat dengan moralitas lebih tinggi memiliki dorongan yang lebih kecil untuk melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan moralitas sebagai faktor pelindung (protective factor) dalam pengambilan keputusan keuangan. Keduanya bersifat preventif, Moralitas internal mendorong pegawai untuk mengikuti prinsip etis, sedangkan kompensasi yang adil memperkuat rasa keadilan dan kepuasan, sehingga keduanya menekan peluang livestream fraud.

H₂ : Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Moralitas (X2) pada pemerintah desa di Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

2.4.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi (X1) Terhadap Kecurangan (Y)

Melalui Moralitas (X2)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Audry Regita Pramesti & Putri Wulanditya (2021) kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan melalui moralitas. Artinya, ketika kompensasi yang diberikan kepada karyawan dinilai adil dan sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan, maka tingkat kecurangan cenderung menurun, terutama jika individu tersebut memiliki tingkat moralitas yang tinggi. Temuan ini mendukung teori keadilan (*equity theory*) yang menyatakan bahwa individu akan cenderung termotivasi untuk bertindak secara etis ketika merasa diperlakukan secara adil oleh organisasi. Kompensasi yang sesuai memperkuat persepsi keadilan, sehingga karyawan merasa dihargai dan cenderung menghindari tindakan curang sebagai bentuk “balas dendam” atas ketidakadilan. Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan teori kognitif moral yang menyatakan bahwa seseorang dengan moralitas tinggi akan cenderung menolak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai etika, walaupun ada peluang untuk melakukan kecurangan. Dengan adanya kompensasi yang sesuai, tekanan atau motif untuk melakukan kecurangan berkurang, dan moralitas individu memperkuat pengambilan keputusan etis.

H₃ : Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kecurangan Melalui Moralitas (X2) pada pemerintah desa di Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pengaruh kesesuaian kompensasi (X_1), dan moralitas (X_2) terhadap kecurangan (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode yang digunakan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berfokus pada variabel-variabel dan hubungan antara variabel satu dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menguji teori-teori melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik statistik, baik pada populasi maupun sampel tertentu (Hardani et al.,2020).

Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecurangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dan mengambil sampel dari pemerintah menggunakan kuisioner alat pengumpul data.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi-informasi tentang hal tersebut,kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2018). Pada penelitian ini yang menjadi variabel penelitian ini adalah pengaruh kesesuaian kompensasi (X_1) dan moralitas (X_2)

terhadap kecurangan (Y) untuk memperoleh representasi yang lebih jelas mengenai penelitian ini. Adapun indikator dari variabel-variabel tersebut diatas dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Opareasional Variabel X

Judul	Variabel	Indikator	Skala
Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.	Kesesuaian kompensasi (X1)	1). Gaji dan upah 2). Insentif 3). Tunjangan 3).Fasilitas (Afandi 2018).	ORDINAL
	Moralitas (X2)	1). Jujur 2). Disiplin 3). Tanggungjawab 4). Toleransi Abdul Majid (2015)	ORDINAL

Tabel 3.2 Operasional Variabel Y

Judul	Variabel	Indikator	Skala
Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.	Kecurangan (Y)	1). Laporan keuangan 2). Penyalahgunaan aset 3). Korupsi 4). kecurangan komputer. (ACFE 2000)	ORDINAL

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek /subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Pengertian ini menunjukkan bahwa populasi bukan hanya manusia, tetapi juga obyek atau benda yang dipelajari, seperti dokumen yang dapat digunakan untuk penelitian. Populasi bukan hanya orang yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi semua karakteristik dan atribut yang dimiliki subjek dan objek yang dipelajari. Adapun penelitian ini, populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di desa Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 15 desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris dan bendahara.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *probability sampling* dengan metode *Cluster Sampling*. Teknik Cluster Sampling adalah penentuan sampel berdasarkan sumber data yang sangat luas yang sifatnya geografis namun yang peneliti gunakan sebagai sampel bila sesuai dengan karakteristik atau kriteria.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dengan cara *Cluster Sampling* ialah cara pengambilan didasarkan kepada anggota-anggotanya, dengan catatan anggota-anggota dari kelompok-kelompok mempunyai karakteristik yang sama. Penelitian berlokasi di

Kecamatan Anggrek yang terdiri dari 15 desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris dan bendahara. Ketiga responden tersebut dipilih karena memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Berikut tugas dari kepala desa, sekretaris dan bendahara dalam pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPD, Mengajukan rancangan pemerintahan desa, Membina kehidupan masyarakat, Membina perekonomian desa.
2. Sekretaris berkedudukan unsur staf pembantu kepala desa dan sekeretaris mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pemabangunan, kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administarsi kepada kepala desa dan bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang APBDesa dan perubahan ABPDesa, pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
3. Bendahara (Kaur Keuangan) mempunyai tugas dan fungsi yaitu mencatat keuangan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan anggaran penerimaan dan belanja desa, dan mencatat serta melaporkan kepada kepala desa apabila menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.

Tabel 3.3 Responden

Nama Desa	Jabatan	Jumlah (Orang)
Tutuwoto	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Langge	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Tolongio	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Ilodulunga	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Mootilango	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Helumo	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Popalo	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Hiyalooile	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Putiana	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
ilangata	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Ibarat	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Datahu	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Iloheluma	Kepala Desa	1

	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Dudepo	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Tolango	Kepala Desa	1
	Sekretaris	1
	Bendahara	1
Total		45 Orang

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Jenis Data Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya. Penelitian kuantitatif ini mendasarkan jenisnya pada penelitian survey, yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen penelitian (Sugiyono, 2019).

1). Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang dijawab langsung oleh subjek melalui penelitian kuisioner.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sampel dari responden yang merupakan Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner fisik dan non-fisik dari sumber primer.

1. Kuisioner

Kuisioner adalah metode pengumpulan data dimana orang diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan dan pernyataan tertulis (sugiyono,2016). Informasi yang dikumpulkan dalam bentuk data ordinal, dan jenis data *cross-section* adalah data yang dikumpulkan pada saat itu. Angket atau kuisioner yang dalam penelitian ini, angket langsung dan tertutup. Angket langsung berarti angket tersebut diberikan langsung. Sedangkan angket tertutup berarti responden memilih jawaban yang tersedia. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini dengan skala likert, yakni skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2019).

No.	Alternatif Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Skala likert alat ini dapat dibuat dalam bentuk ceklis ataupun pilihan ganda. Ini adalah kisi-kisi angket yang akan digunakan untuk membuat pertanyaan penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian yaitu Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecurangan pada Pemerintah Desa. Untuk memperoleh data yang relevan kuisioner dibagikan secara langsung kepada responden pada Aparat Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

3.5 Metode Analisis Data Penelitian

Data yang terkumpul dari kuesioner ditabulasi, selanjutnya diolah menggunakan model *Path Analysis*. *Path Analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (*Endogen*) (Sani dan Maharani 2013). Koefisien jalur (*path analysis*) adalah koefisien regresi yang distandardkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku (Z-score).

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel endogen dan variabel eksogen. Pengujian ini digunakan dengan cara analisis jalur (*path analysis*). Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat path coefisien.

Untuk melihat hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat nilai *path coefficient* dan p-value dalam total *effects* hasil dari pengolahan data variabel secara simultan. Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara *statistic* dapat dihitung melalui tingkat signifikasinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 10%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 10% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,1 untuk menolak suatu hipotesis (Sugiyono, 2019).

1.5.1 Uji Measurment Model (*Outer Model*)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis outer model atau measurement model yang merupakan model pengukuran untuk mengetahui hubungan antar variabel laten dengan indikator. Dari pengujian indikator yang diperoleh instrumen uji validitas dan uji realibitas model yang diukur dengan kriteria sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu alat ukur yang diuji untuk sebuah tingkat keefektifitasannya media ukur untuk memperoleh data valid atau tidak (Janna, 2021). Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrument kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini akan layak dan mampu menyajikan data yang akurat. Terdapat dua jenis model dalam melakukan uji validitas yaitu *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*.

1. *Convergent Validity*

Validitas konvergen berguna untuk mengukur seberapa besarnya korelasi antara variabel laten dengan konstruknya, dengan standar *loading factor*. Apabila

ada sebuah indikator yang tidak memenuhi syarat maka harus dihilangkan (Lamere et al., 2021).

a. *Loading Factor atau Outer Loading*

Uji validitas konvergen dengan melihat skor loading factor dengan *Rule of Thumb* dalam penilaian *convergent validity* yang dapat dilihat dari nilai loading factor antara 0,70 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* (Susanto et al., 2020).

b. *Average Variance Extracted (AVE)*

Syarat pengujian dalam penggunaan *Average Variance Extracted (AVE)* dapat dikatakan valid nilai yang dimiliki setiap konstruk harus lebih besar dari 0,70 (Utami & Siswanto, 2021).

2. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya (Lamere et al., 2021). *Discriminant validity* diukur melalui nilai *cross loading* antara indikator dengan konstruknya. Jika model dikatakan mempunyai discriminant validity yang baik ialah jika setiap nilai *cross loading* variabel laten dari indikator yang memiliki nilai *loading* yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *loading* jika dikorelasikan dengan variabel lainnya (Wiyono, 2020).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat pengujian yang dilakukan dalam penelitian untuk menunjukkan sejauh mana kuesioner dapat dipercaya dan diandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa jika sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan dengan gejala yang sama dan menggunakan alat ukur yang sama. Bisa

dikatakan bahwa alat ukur reliabel maka bisa menghasilkan hasil yang konsisten meskipun dilakukan pengukuran berulang kali (Amanda et al., 2019). Sebelum melakukan uji reliabilitas, tahap awal harus dilakukan uji validitas data. Oleh karena itu data yang diukur harus mendapatkan hasil yang valid nilai $>0,70$.

3.5.2 Uji Structural Model (Inner Model)

Inner model merupakan suatu model yang digunakan untuk mengetahui sebab akibat diantara hubungan antar variabel laten. Pada saat melakukan pengujian dengan menggunakan SMART PLS, dengan nilai R-square yang merupakan uji goodness of fit dengan penilaian tersebut melihat nilai R-square untuk setiap variabel dependen. Dengan perubahan nilai R-square dapat digunakan sebagai melihat pengaruh variabel independend terhadap variabel dependen, apakah mempunyai pengaruh substansif (Pulungan & Rivai, 2021). Terdapat model structural dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Signifikansi dan Uji Hipotesis

Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan oleh t-statistic, harus di atas 1.96 untuk hipotesis dua ekor (two-tailed) dan di atas 1.64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk pengujian hipotesis pada alpha 5% dan power 80%, pada hipotesis dua ekor (two-tailed) nilai t-statistics > 1.96 pada path antar variabel, hal tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan.

1. R-Square

R *Square* adalah koefisiensi determinasi pada konstruk endogen. Nilai R square sebesar 0,75 (kuat), 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah).

2. Goodness of Fit dengan Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi variabel laten dependen dijelaskan oleh variabel laten independen. Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

3.5.3 Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan pengembangan dari regresi berganda yang melibatkan variabel lebih dari dua variabel dan saling mempunyai hubungan yang komplek. Adapun tujuan dari analisis jalur tersebut untuk mengetahui hubungan struktural berbagai variabel bebas dan variabel terikat serta besarnya pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung serta pengaruh total dari model yang dibangun dalam penelitian (Trianto, 2015).

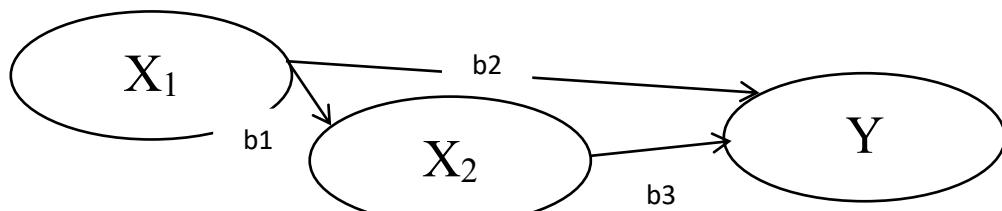
Langkah-langkah dalam analisis jalur adalah disesuaikan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menstandarkan semua data penelitian dimana semua variabel penelitian ini terukur.
2. Menggambarkan rancangan diagram jalur sebagaimana yang dijabarkan di atas.

3. Menganalisis persamaan analisis jalur dan pengujian hipotesis dengan program Smart PLS
4. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari pengolahan data tersebut di atas.

Dalam analisis model jalur (path), harus terlebih dahulu dibuat model jalur untuk menguji ada tidaknya peran mediasi. Model jalur merupakan suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara dan tergantung. Dalam analisis jalur, pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah, dimana anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel exogenous dan endogenous. Untuk mengukur ada tidaknya pengaruh mediasi atau intervening menggunakan perbandingan koefisien jalur.

Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar yang menunjukkan pengaruh langsung suatu variabel bebas dan variabel tergantung dalam suatu model. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan (Ghozali 2013). Berikut gambar model *path analysis* :



Gambar 3.1 Model Analisis Jalur (Path Analysis)

Model ini memiliki dua persamaan struktural yang menghubungkan kesesuaian kompensasi (X_1), moralitas (X_2) dan kecurangan (Y).

1. Persamaan 1 : $X_2 = b_1 \cdot X_1 + e_1$

- 1). Di sini, b_1 adalah koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh langsung Kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap Moralitas (X_2).
- 2). e_1 adalah error atau sisa dalam struktur pertama, yang mencerminkan variabel lain yang tidak dimasukkan tetapi dapat mempengaruhi (X_2)

2. Persamaan 2 : $Y = b_2 \cdot X_1 + b_3 \cdot X_2 + e_2$

- 1). b_2 adalah koefisien jalur untuk pengaruh langsung dari Kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap Kecurangan (Y).
- 2). b_3 adalah koefisien jalur untuk pengaruh tidak langsung dari Kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap Kecurangan (Y) melalui Moralitas (X_2).
- 3). e_2 adalah error dalam struktur kedua, yang mencerminkan pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini tetapi dapat memengaruhi Y.

3.1 Interpretasi Analisis Jalur

Interpretasi analisis jalur adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Langsung

Untuk menghitung pengaruh langsung, digunakan formula sebagai berikut :

- a. Pengaruh variabel kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap kecurangan (Y)
- b. Pengaruh variabel kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap moralitas (X_2)

2. Pengaruh Tidak Langsung

Untuk menghitung pengaruh tidak langsung, digunakan formula sebagai berikut:

Pengaruh variable kesesuaian kompensasi (X_1) terhadap kecurangan (Y) melalui moralitas (X_2)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten Di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini di bentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 2007 padaq tanggal 02 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) kabupaten Gorontalo.

Gorontalo Utara merupakan daratan dengan ketinggian rata-rata 55,5 meter di atas permukaan laut terletak pada $1^{\circ}07'55''$ Lintang Utara dan $0^{\circ}41,23,2$ Lintang Utara, serta $121^{\circ}58,59''$ - $123^{\circ}16,29''$ Bujur Timur. Luas wilayah Gorontalo Utara adalah $1.777,022 \text{ km}^2$. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki batas-batas : Utara- Laut Sulawesi., Selatan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo.,Barat- Provinsi Sulawesi Tengah.,Timut-Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Gorontalo Utara Terdiri dari 11 kecamatan dan 124 desa dengan jumlah penduduk 124.202 jiwa dengan sebaran penduduk 74 jiwa/km^2 , serta luas wilayah mencapai $1.676,15 \text{ km}^2$

4.1.2 Sejarah Kecamatan Anggrek

Kecamatan Anggrek merupakan kecamatan yang terletak disebelah barat ibukota Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Anggek di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan kwandang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Monano. Ibukota Kecamatan Anggrek

adalah Ilangata yang berjarak hanya 14,9 km dari Ibukota Gorontalo Utara sehingga Kecamatan ini cukup mudah untuk dijangkau melalui jalur darat.

Luas Wilayah Kecamatan Anggrek adalah 147,507 km², hampir mencapai 8% dari luas Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Anggrek dibentuk dengan dasar hukum PERDA KAB.GORONTALO no 29 tahun 2001, jadi kecamatan ini terbentuk sebelum Kabupaten Gorontalo Utara itu sendiri terbentuk atau ketika masih Kabupaten Gorontalo. Pada awal dibentuk Kecamatan Anggrek hanya memiliki 8 desa yang terdiri dari 47 dusun. Pada tahun 2015, Kecamatan ini sudah terdiri dari 15 desa dan 68 dusun karena terjadi beberapa pemekaran desa, Desa Ilangata dan Desa Ibarat merupakan desa yang paling banyak memiliki dusun, masing-masing memiliki 7 dusun. Semenjak 2011 Kecamatan ini dipimpin oleh Drs. Musyakar Takaredas, camat ke 7 yang memimpin Kecamatan Anggrek.

4.1.3 Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Anggrek

1. Visi

Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera, dan Berkeadilan.

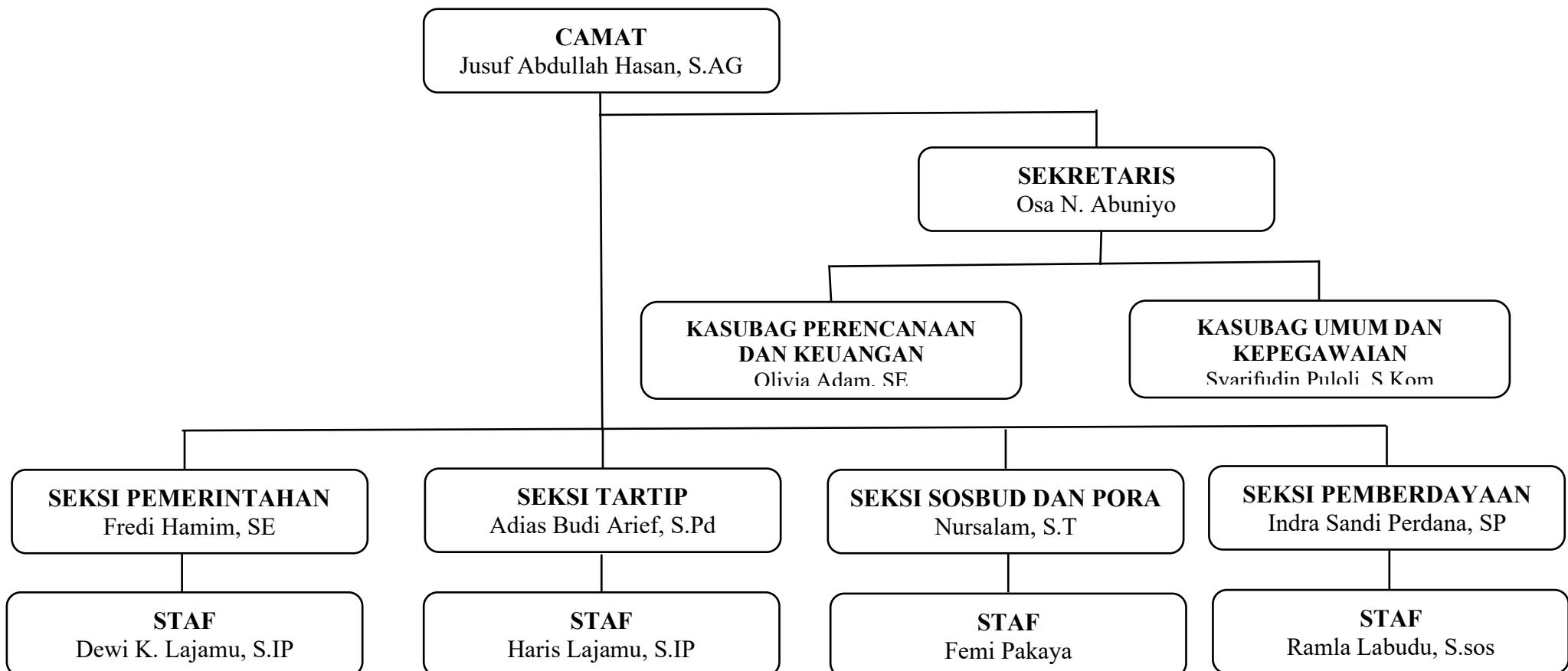
2. Misi

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara berkelanjutan.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Masyarakat

- e. Meningkatkan semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat agar proaktif dalam mengelola potensi wilayah
- f. Meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan hukum.

4.1.4 Struktur Kecamatan Anggrek

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KANTOR CAMAT ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA



4.2 Gambaran Umum karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perolehan data primer yang dihasilkan melalui pengedaran kuisioner (Angket) yang diberikan kepada Aparat Desa Kecamatan Anggrek pada bulan Januari 2025. Dalam hasil pengukuran dan penerimaan responden, penelitian ini menyajikan dan menganalisis data pada struktur penyajian data. Jabatan, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan lama bekerja merupakan karakteristik responden.

4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian

Hasil menyebarkan kuisioner kepada 45 Aparat Desa se-Kecamatan Anggrek. Dari keseluruhan yang tersebar 45 kuisioner yang kembali dan dapat diolah, yang selanjutnya diuji dan di analisis. Tingkat pengembalian kuisioner dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner

Kriteria	Jumlah	Presentase
Kuisioner yang disebar	45	100%
Jumlah kuisioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah kuisioner yang tidak lengkap	0	0%
Kuisioner yang memenuhi syarat	45	100%

Sumber : Data diolah excel, 2025

Tabel diatas menerangkan bahwa kuisioner yang disebar 45 buah, dan kuisioner yang diisi secara lengkap 45 buah atau tingkat pengembalian kuisioner 100%.

4.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan temuan penelitian yang melibatkan penyebaran kuisioner kepada 45 responden untuk megumpulkan data, dapat di ringkas bahwa karakteristik responden sesuai jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	26
Laki-laki	19

Sumber : Data diolah excel, 2025

Dari tabel diatas bahwa responden penelitian dapat di ringkas karakteristik responden sesuai jenis kelamin. Dengan 26 responden berjenis kelamin Perempuan dan 19 responden berjenis kelamin laki-laki.

4.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan tingkat Pendidikan dapat di lihat dari table sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kriteria Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

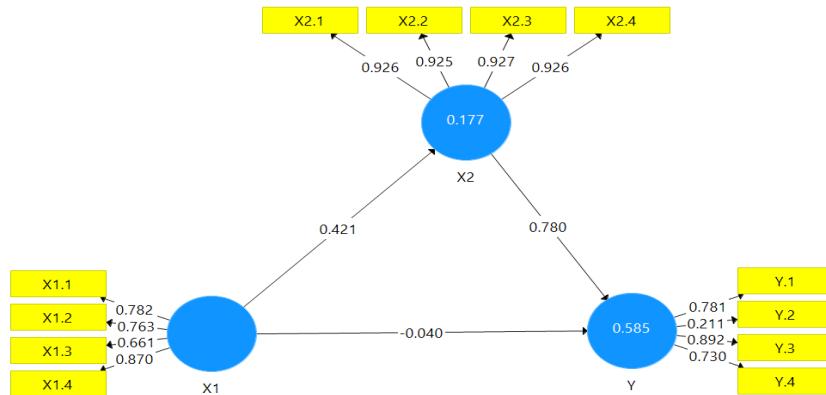
Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA	26
S1	18
S2	1

Sumber : Data diolah excel, 2025

Dari tabel di atas data responden berdasarkan tingkat pendidikan dimana responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 26 orang, Strata 1 (S1) berjumlah 18 orang dan Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini analisis menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) yang menggunakan software SmartPLS 3.0. Model evaluasi dalam PLS dilakukan dalam penilaian *outer model* dan *inner model*. Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan SmartPLS 3.0 dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Estimasi Model Awal Penelitian

4.3.1 Measurment Model (*Outer Model*)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis *outer model* atau *measurement model* yang merupakan model pengukuran untuk mengetahui hubungan antar variabel laten dengan indikator. Dari pengujian indikator yang diperoleh instrumen uji validitas dan uji realibitas model yang diukur dengan kriteria sebagai berikut.

Pengujian model (*Outer Model*) dapat dievaluasi dengan melihat Average Variance Extracted (AVE) dan *outer loading*. *Outer loading* merupakan tabel yang berisi *loading factor* untuk melihat besar korelasi antara indikator dengan peubah laten. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruksi yang diinginkan (Ghozali, 2021).

1. Convergent Validity

Berikut ini adalah pengolahan data pertama berdasarkan 3 variabel dengan jumlah 12 pernyataan :

Tabel 4.4 Loading Factor atau Outer Loading

Variabel	Indikator	Loading factor	Keterangan
X1	X1.1	0.782	Valid
	X1.2	0.763	Valid
	X1.3	0.661	Tidak Valid
	X1.4	0.870	Valid
X2	X2.1	0.926	Valid
	X2.2	0.925	Valid
	X2.3	0.927	Valid
	X2.4	0.926	Valid
Y	Y1	0.781	Valid
	Y2	0.211	Tidak Valid
	Y3	0.892	Valid
	Y4	0.730	Valid

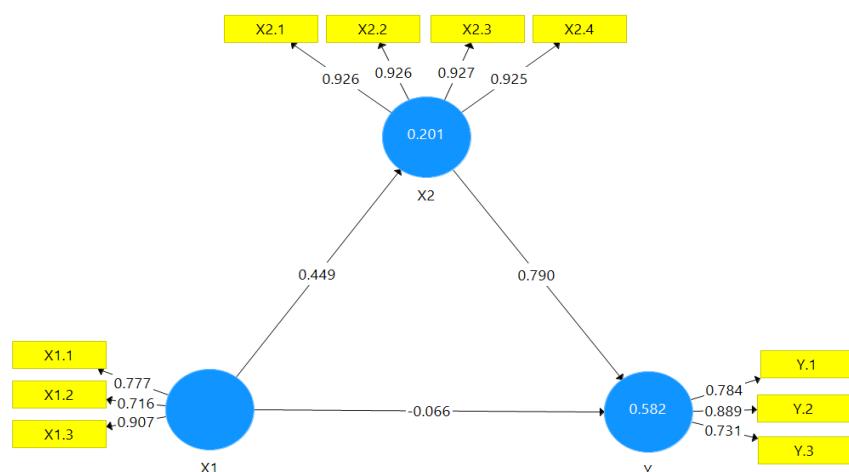
Sumber : Data diolah SmartPLS 3.0, 2025

Convergent validity dari model pengukuran dapat dari korelasi antara skor item/instrumen dengan skor konstruknya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap instrumen > 0.7. Berdasarkan pengolahan data pertama dengan variabel Kesesuaian Kompensasi (X1) dengan instrumen nilai yang valid 3 dan tidak valid 1, Moralitas (X2) dengan instrumen nilai valid semua dan Kecurangan (*Fraud*) dengan instumen nilai yang valid 3 dan yang tidak valid 1. Jadi yang valid terdapat 10 indikator dan yang tidak valid terdapat 2 indikator. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengeluarkan data yang tidak valid seperti yang dijelaskan oleh Harman (2008) bahwa model pengukuran dengan refleksif indicator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score*

dengan *construct score* yang dihitung dan ukuran refleksif indicator tersebut dikatakan tinggi jika korelasinya lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Atas pertimbangan tersebut, penulis menghilangkan atau mengeliminasi indikator yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,70 untuk memperoleh nilai uji realibilitas dan validitas yang baik.

Eliminasi indikator dalam analisis SEM harus dilakukan secara berbasis data dan prinsip statistik, bukan sekedar pertimbangan subjektif. Hair et al (2017) menekankan pentingnya mempertahankan indikator yang valid dan reliabel agar model pengukuran dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat. Proses eliminasi indikator mencakup evaluasi terhadap nilai loading, AVE, reliabilitas, dan validitas diskriminan secara menyeluruh.

Dengan demikian dari penjelasan proses eliminasi menurut Hair et al (2017) maka di peroleh, outer model awal yang berjumlah 12 indikator reduksi menjadi 10 item, sehingga model akhir penelitian sebagai berikut:



Gambar 4.3 perubahan Outer model Re-estimasi

Setelah dilakukan olah data kembali maka diperoleh variabel kesesuaian kompensasi (X1) terdapat 3 instrumen yang valid, variabel (X2) terdapat 4 instrumen yang valid dan kecurangan (Y) terdapat 3 instrumen yang valid . dengan jumlah data yang dibuang kesesuaian kompensasi (X1) terdapat 1 instrumen dan kecurangan (Y) terdapat 1 instrumen. Dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Loading Factor atau Outer Loading

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
X1	X.1	0,777	Valid
	X.2	0,716	Valid
	X.3	0,907	Valid
X2	X2.1	0,926	Valid
	X2.2	0,926	Valid
	X2.3	0,927	Valid
	X2.4	0,925	Valid
Y	Y.1	0,784	Valid
	Y.2	0,889	Valid
	Y.3	0,731	Valid

Sumber : Data diolah SmartPLS 3.0, 2025

Data yang diuji dan dinyatakan tidak valid akan dikeluarkan dari analisis karena tidak memenuhi kriteria atau asumsi yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Data yang dinyatakan tidak valid dapat mengubah hasil analisis secara signifikan, menyebabkan rata-rata atau hubungan antar variabel sehingga menjadi tidak akurat.

Setelah di lakukan pengelohan data kembali dengan variabel kesesuaian kompensasi (X1) terdapat 3 intrumen yang valid, variable moralitas (x2) terdapat 4 instrumen yang valid dan variable kecurangan (Y) 3 insturmen valid. Dengan

jumlah data yang di buang kesesuaian kompensasi (X1) terdapat 1 intrumen, dan kecurangan (Y) terdapat 1 intrumen yang di buang.

2. *Discriminant Validity*

Penilaian *discriminant validity* telah menjadi prasyarat yang diterima secara umum untuk menganalisis hubungan antar variabel laten. Untuk pemodelan persamaan struktural berbasis varian, seperti kuadrat terkecil parsial, kriteria *FornellLarcker* dan pemeriksaan *cross-loading* adalah pendekatan yang dominan untuk mengevaluasi validitas diskriminan. *Discriminant validity* adalah tingkat diferensi suatu indikator dalam mengukur konstruk instrumen. Untuk menguji *discriminant validity* dapat dilakukan dengan pemeriksaan *Cross Loading* yaitu koefisien korelasi indikator terhadap konstruk asosiasinya (*crossloading*) dibandingkan dengan koefisien korelasi dengan konstruk lain (*cross loading*). Nilai konstruk korelasi indikator harus lebih besar terhadap konstruk asosiasinya daripada konstruk lain. Nilai yang lebih besar tersebut mengindikasikan kecocokan suatu indikator untuk menjelaskan konstruk asosiasinya dibandingkan menjelaskan konstruk-konstruk yang lain.

Tabel 4.6 Fornell Criterion Discriminant Validity

	Kesesuaian Kompensasi (X1)	Moralitas (X2)	Kecurangan (Y)
X1	0.804		
X2	0.449	0.926	
Y	0.289	0.760	0.804

Sumber : Data diolah SmartPLS 3.0,2025

Dari hasil menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai cross loading. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki discriminant validity yang baik, dimana pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator blok lainnya.

Berdasarkan data discriminant validity di atas, nilai diagonal merupakan nilai akar kuadrat AVE dan nilai di bawah merupakan korelasi antar konstruk. Nilai akar kuadrat AVE pada tabel diatas lebih tinggi dari pada nilai korelasi, jadi dapat disimpulkan model valid karena telah memenuhi discriminant validity. Cara lain untuk mengukur discriminant validity adalah dengan melihat nilai square root of average variance extracted (AVE), nilai yang disarankan adalah diatas 0,50. Berikut ini ialah nilai uji reliabilitas yang dilihat dari nilai AVE pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7 Everage Varianve Extracted (AVE)

Variabel	Everage Varianve Extracted (AVE)	Ket
Kesesuaian kompensasi	0.646	Valid
Moralitas	0.857	Valid
Kecurangan	0.646	Valid

Sumber : Data diolah SmartPLS 3.0, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 memberikan nilai AVE diatas 0,50 untuk semua konstruk Kesesuaian Kompensasi memiliki AVE 0,646, Moralitas memiliki AVE 0,857, dan Kecurangan (*Fraud*) memiliki AVE 0,646. Jadi dapat disimpulkan konstruk variabel kesesuaian kompensasi dan moralitas memiliki nilai AVE yang tinggi, sedangkan kecurangan memiliki nilai AVE yang rendah. Jadi konstruk yang memiliki nilai diatas >5,0 hanya kesesuaian kompensasi dan moralitas.

4.3.2 Uji reabilitas

1. Composite Reability

Setelah menguji validitas konstruk, pengujian selanjutnya adalah uji *reliabilitas* konstruk yang diukur dengan *Composite Reliability* (CR) dari blok indikator yang mengukur konstruk CR digunakan untuk menampilkan reliabilitas yang baik. Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability > 0.7 . koefisien composite reliability harus lebih besar dari 0.7 sehingga nilai 0.7 dapat diterima. Namun, uji konsistensi internal tidak mutlak untuk dilakukan jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah yang reliabel, sebaliknya konstruk yang reliabel belum tentu valid.

Tabel 4.8 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Ket
Kesesuaian Kompensasi	0.844	Valid
Moralitas	0.960	Valid
Kecurangan	0.845	Valid

Sumber : Data diolah SmartPLS 3.0,2025

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan hasil dari composite reliability (uji reliabilitas) yang sangat memuaskan yaitu Kesesuaian Kompensasi dengan nilai (0,844). Moralitas dengan nilai (0,960) dan Kecurangan dengan nilai (0,845). Kemudian dapat disimpulkan bahwa Kesesuaian Kompensasi, Moralitas dan Kecurangan memiliki tingkat uji reliabilitas yang tinggi, hal ini dapat ditunjukkan dari nilai composite reliability dari seluruh konstruk lebih besar dari 0.70.

4.4 Analisis Uji Structural Model (Inner Model)

Penilaian model struktural dengan menggunakan SmartPLS di mulai dengan melihat nilai R Square untuk setiap variabel laten endogen yakni Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan sebagai kekuatan prediksi dari model struktural.

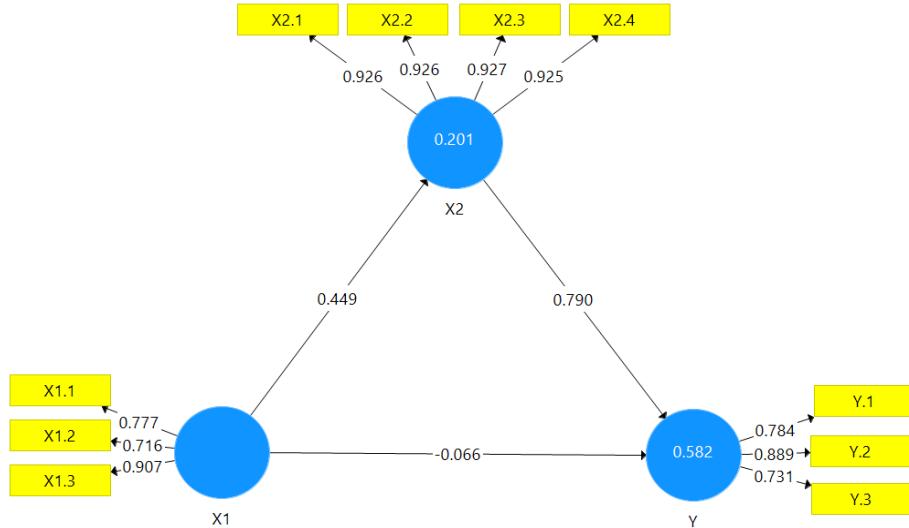
Tabel 4.9 Inner Model

	R Square	R Square Adjusted
Kecurangan (Y)	0.582	0.561

Sumber : Data diolah SmartPLS 3.0, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 R Square variabel Kecurangan sebesar 0,582. Hal ini berarti variabel laten Kesesuaian kompensasi dan Moralitas mampu menerangkan atau memprediksi Kecurangan 58,2% sedangkan 41,8% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini

4.5 Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)



Gambar 4.3 Uji Instrumen Data

Untuk mengetahui hubungan *structural* antar variabel laten, harus dilakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien jalur antar variabel dengan membandingkan angka p-value dengan alpha (0.005) atau t-statistik sebesar (>1.96). Besarnya P-value dan juga t-statistik diperoleh dari output pada *SmartPLS* dengan menggunakan metode *bootstrapping*. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang terdiri dari 3 hipotesis berikut ini:

H₁ : Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

H₂ : Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap moralitas (X2) pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

H_3 : Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan (Y) melalui moralitas (X2) pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 4.10 Path Coefficients hipotesis 1

Kriteria	Kesesuaian kompensasi	
t-Statistik	0.449	
P-Value	0.653	Kecurangan

Sumber: Data diolah, SmartPLS 2025

Uji Hipotesis 1

H_1 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai P- Value sebesar $0.653 < 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $0.449 > 1.96$ maka H_1 ditolak, yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan atau hasil tersebut ditolak.

Tabel 4.11 Path Coefficients hipotesis 2

Kriteria	Kesesuaian kompensasi	
t-Statistik	1.487	
P-Value	0.138	Moralitas

Sumber: Data diolah, SmartPLS 2025

Uji Hipotesis 2

H_2 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap moralitas pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai P-Value sebesar $0.138 < 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $1.487 > 1.96$ maka H_2 ditolak, yang berarti bahwa

kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap moralitas atau hasil tersebut ditolak.

Tabel 4.12 Path Coefficients hipotesis 3

Kriteria	Kecurangan	Moralitas
t-Statistik	5.693	
P-Value	0.000	

Sumber: Data diolah, SmartPLS 2025

Uji Hipotesis 3

H3: Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan melalui moralitas pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai P-Value sebesar $0.000 < 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $5.693 > 1.96$ maka H3 diterima, yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan melalui moralitas atau diterima.

Tabel 4.13 Hipotesis Hasil Analisis

	Hipotesis	Kesimpulan
Hipotesis 1	Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	Ditolak
Hipotesis 2	Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap moralitas pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	Ditolak
Hipotesis 3	Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan melalui moralitas pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	Diterima

4.6 Pembahasan

Penelitian ini menguji variabel Pengaruh kesesuaian kompensasi (X1) dan moralitas (X2) terhadap kecurangan (Y) Pemerintah Desa Kabupaten Gorontalo Utara.

4.6.1 Pengaruh Kesesuaian kompensasi (X1) Terhadap kecurangan (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan nilai P-Value sebesar 0.449 > 0.05 atau dengan tstatistik sebesar $0.653 < 1.96$ maka H1 yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan atau hasilnya ditolak, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini secara statistik menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi, semakin kecil kemungkinan terjadi kecurangan.

Maka hasil menunjukkan bahwa besarnya atau kenyamanan kompensasi yang diterima oleh pegawai tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan kecurangan tersebut. Selain itu, pegawai yang merasa pembaruannya sesuai belum tentu memiliki dorongan lebih rendah untuk melakukan penipuan, dan pegawai yang merasa pembaruannya tidak sesuai belum tentu lebih cenderung melakukan penipuan.

Selain itu, *Fraud Hexagon* juga menekankan unsur “*capability*” (kapabilitas), yaitu kemampuan atau posisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Namun, jika individu dengan kapabilitas tinggi sudah mendapatkan kompensasi yang adil, maka motivasi untuk

menyalahgunakan kemampuannya akan berkurang. Resiko yang harus ditanggung dianggap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh dari tindakan curang.

Jika imbalan dianggap tidak sesuai atau tidak adil, dapat dilakukan tindakan kecurangan. Salah satu contohnya adalah jika aparat desa merasa “tidak dihargai”, yang berarti mereka mencari lebih banyak uang secara tidak sah, rasa tidak puas dan kurangnya moral kerja membuat lebih mudah bagi seseorang untuk berperilaku menyimpang, peluang korupsi meningkat karena sistem dihargai dan hukuman yang lemah, penghidupan yang layak dan sesuai. Sebaliknya dapat menurunkan kondisi risiko karena meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, menciptakan budaya kerja yang memiliki standar moral dan profesional, mengurangi kebutuhan untuk mencari cara ilegal untuk mendapatkan uang tambahan.

Kemungkinan kondisi dalam pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh seberapa besar kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa. Kecurangan dapat terjadi karena kompensasi yang tidak sesuai dengan kinerja atau kebutuhan. Studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian berpengaruh besar terhadap kecenderungan untuk melakukan penipuan dalam pengelolaan keuangan desa . Pemerintah desa dapat merasa tidak puas atau tertekan jika kompensasi yang mereka terima tidak sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawab mereka, yang pada pasangan mendorong mereka untuk melakukan kondisi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri Damayanti dan Anissa Hakim Purwantini 2021), dengan judul “Pengaruh moralitas individu, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, dan integritas terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada OPD Kabupaten Magelang). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi secara negatif. Dengan kata lain, kompensasi yang tidak sesuai akan mendorong karyawan untuk melakukan kecurangan untuk memenuhi tuntutan dan tekanan yang mereka rasakan. Ada kemungkinan bahwa kesesuaian kompensasi akan mempengaruhi kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan, seperti penggelapan atau pencurian aset perusahaan, jika gaji yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, asuransi yang diberikan oleh instansi, dan tunjangan pegawai yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

4.6.2 Pengaruh Kesesuaian kompensasi (X1) Terhadap moralitas (X2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan nilai P-Value sebesar $1.487 > 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $0.138 < 1.96$ maka H₂ diterima yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap moralitas.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap moralitas atau hasilnya ditolak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini secara statistik menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi, maka moralitas akan semakin meningkat. Artinya, meskipun tingkat kompensasi meningkat, hal tersebut tidak serta-merta mendorong peningkatan moralitas dalam menjalankan tugas atau menghindari perilaku menyimpang.

Fenomena ini terjadi ketika pejabat pemerintah desa cenderung menjalankan tugas mereka berdasarkan nilai-nilai sosial, adat, dan norma budaya yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Akibatnya, moralitas mereka lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal seperti integritas pribadi, religiusitas, dan tekanan sosial dari lingkungan mereka dibandingkan faktor eksternal seperti kompensasi.

Namun, situasi di mana kesejahteraan tidak berdampak positif pada moralitas pemerintah desa . Beberapa alasan untuk hal ini adalah bahwa moralitas pegawai tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti gaji, tetapi juga oleh nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan integritas individu. Jika budaya dan lingkungan kerja suatu organisasi atau tempat kerja tidak melarang atau mengizinkan pelanggaran etika, kompensasi yang tepat tidak akan memotivasi perilaku moral. Tidak adanya pengawasan dan sanksi yang mampu dan sistem akuntabilitas yang efektif juga akan membuat kompensasi yang mampu tersebut tidak cukup untuk menekan perilaku tidak etis.

Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem tidak cukup untuk meningkatkan moral aparatur pemerintah desa. Seperti pendidikan moral dan etika, penguatan sistem pengawasan, dan budaya organisasi yang mendukung integritas adalah langkah-langkah yang lebih mendalam yang diperlukan. Memang penyelesaian yang sesuai penting, tetapi itu bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan moralitas. Dalam pemerintahan desa, sistem nilai dan budaya organisasi mempengaruhi moralitas. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus fokus pada perubahan sistem dan nilai daripada hanya mengubah aspek fisik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Suarniti dan Ratna (2020) yang dinyatakan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suarniti dan Ratna (2020) yang menyatakan apabila kompensasi yang diberikan sudah sesuai maka kemungkinan individu untuk melakukan kecurangan akuntansi semakin kecil. Hasil menemukan bahwa kompensasi yang sesuai dapat menurunkan kemungkinan individu untuk melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, jika pegawai merasa kompensasinya adil, maka dorongan untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Studi Natalia dkk. (2020), Pramana dkk. (2020), dan Yulia dkk. (2021) yang menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin sesuai kompensasi yang diberikan, semakin rendah kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan. Namun hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Ardiana (2019) yang menemukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasilnya berbeda dengan penelitian yang dibahas sebelumnya bahwa pengaruh kompensasi yang sesuai tidak berdampak pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap perilaku curang.

4.6.3 Pengaruh Kesesuaian kompensasi (X1) terhadap kecurangan (Y) melalui moralitas (X2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan nilai P-Value sebesar $5.693 > 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $0.000 < 1.96$ maka H2 diterima yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap moralitas.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan melalui moralitas atau hasilnya diterima, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan melalui moralitas. Yang artinya kompensasi yang dirasa adil dan sesuai dapat memengaruhi moralitas individu dalam membuat keputusan terkait perilaku menyimpang. Secara khusus, moralitas bertindak sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Moralitas yang tinggi akan memperkecil kemungkinan seseorang melakukan kecurangan, meskipun terdapat dorongan atau kesempatan.

Hasil ini sejalan dengan Theory Hexagon Fraud, yang menambahkan elemen penting untuk menjelaskan faktor penyebab kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), ego, dan kolusi. Dalam situasi seperti ini, ketidaksesuaian kompensasi dapat menyebabkan tekanan bagi seseorang. Tekanan ini kemudian memengaruhi persepsi mereka tentang kebenaran dan moralitas. Jika tekanan tersebut cukup besar dan tidak diimbangi dengan moralitas yang kuat, seseorang cenderung melakukan rasionalisasi terhadap perilaku curang.

Untuk mencegah kecurangan, moralitas sangat penting. Tekanan atau insentif negatif akan lebih sulit mempengaruhi orang yang memiliki moralitas yang kuat. Sebaliknya, ketika moralitas menurun, tekanan yang disebabkan oleh ketidakpuasan dapat dengan mudah menjadi alasan atau alasan untuk melakukan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kompensasi menjadi faktor penting dalam memicu tekanan, moralitas tetap menjadi benteng terakhir yang mencegah kecurangan.

Penghargaan yang diberikan kepada aparatur pemerintah desa atas jasa dan kontribusi mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat desa yang dikenal sebagai kompensasi. Kesesuaian imbalan mengacu pada seberapa proporsional dan adil gaji yang diterima dibandingkan dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

Kesesuaian penyelesaian dalam pemerintah desa sangat penting untuk menentukan moral dan integritas aparatur desa. Ketidaksesuaian sering kali memicu tindakan yang menyimpang, seperti manipulasi laporan keuangan , penyelewengan dana desa, hingga disetujui . Sebaliknya, kompensasi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan komitmen terhadap etika dan aturan yang berlaku.

Pemerintahan desa dapat mengalami masalah dalam hal konsultasi anggaran, pemotongan dana bantuan, penggelapan aset, dan sebagainya. Kesesuaian yang konsisten yang meningkatkan moralitas akan mengurangi keinginan untuk melakukan tindakan curang. Pegawai desa yang merasa dihargai

dan bermoral akan lebih termotivasi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjadi jujur dan akuntabel. Perdamaian membantu menurunkan kemungkinan kondisi pemerintahan desa dengan meningkatkan moral aparatur. Oleh karena itu, kebijakan penyelesaian yang adil dan terbuka perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan etika dan integritas administrasi desa.

Moralitas berfungsi sebagai perantara dalam hubungan antara perdamaian dan kondisi. Individu dengan moralitas yang tinggi tidak akan melakukan keadaan, meskipun mereka mungkin melakukannya karena keinginan atau kesempatan; sebaliknya, individu dengan moralitas yang lemah dapat menggunakan kompensasi yang tidak sesuai sebagai alasan untuk melakukan perilaku menyimpang.

Pegawai desa dapat ditingkatkan dengan kompensasi yang sesuai. Moralitas di sini terdiri dari prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Aparatur cenderung lebih berkomitmen pada standar dan etika kerja yang berlaku ketika mereka merasa dihargai secara adil. Sebaliknya, hasil yang tidak memuaskan dapat menyebabkan kekecewaan, dan bahkan mendorong perilaku yang tidak etis, seperti situasi bagaimana keterjangkauan dapat berdampak pada kondisi perilaku dapat dijelaskan oleh moralitas sebagai variabel mediasi. Artinya, penyelesaian yang tepat meningkatkan moral individu dalam organisasi daripada menurunkan kondisi secara langsung. Jika pegawai desa yang bermoral tinggi mempunyai kesempatan untuk berbuat curang, mereka cenderung menolaknya karena mereka menyadari dampak etis dan sosial dari tindakan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Damayanti & Putra, Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kepuasan Kerja, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi menunjukkan bahwa kompensasi yang sesuai tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap moralitas kerja aparatur desa. Hasil penelitian ini menunjukkan keterbatasan peran kompensasi dalam membentuk moralitas atau mencegah penyimpangan etis, dan menyiratkan bahwa moral atau etika kerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal individu atau budaya organisasi.

4.7 Karakteristik Responden dan Kaitannya dengan Hasil Penelitian

Berdasarkan data karakteristik responden berjenis kelamin yang terdiri dari 26 orang perempuan dan 19 orang laki-laki, serta mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang juga dianalisis, maka profil demografis ini dapat memberikan konteks penting dalam menafsirkan hasil penelitian mengenai pengaruh kompensasi terhadap kecurangan melalui moralitas.

1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, responden yang terlibat terdiri dari:

- 26 orang berjenis kelamin perempuan
- 19 orang berjenis kelamin laki-laki

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa semakin besar kompensasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan, dan bahwa kompensasi yang sesuai juga dapat meningkatkan moralitas, yang selanjutnya berdampak pada penurunan perilaku kecurangan. Hasil ini memperkuat peran penting moralitas sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kompensasi dan kecurangan.

Jumlah responden perempuan yang dominan (26 dari 45) dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam bekerja mungkin lebih kuat diinternalisasi pada kelompok ini, membuat mereka lebih peka terhadap keadilan saat memberikan kompensasi. Akibatnya, kompensasi yang adil mungkin lebih efektif dalam membentuk moralitas dan mencegah kecurangan.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari sisi pendidikan, responden terdiri dari:

- 26 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 18 orang berpendidikan Strata 1 (S1)
- 1 orang berpendidikan Strata 2 (S2)

Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar peserta penelitian adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan 18 dari mereka berpendidikan Strata 1 (S1), dan hanya 1 dari mereka berpendidikan Strata 2 (S2). Tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami aturan, moral kerja, dan tanggung jawab. Namun, beberapa tidak memiliki pendidikan tinggi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa besarnya atau kenyamanan kompensasi yang diterima pegawai tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan kecurangan. Namun, secara statistik, ditemukan bahwa semakin besar kompensasi, maka moralitas akan semakin meningkat, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan melalui moralitas.

Hal ini dapat dihubungkan dengan karakteristik responden, khususnya tingkat pendidikan, di mana individu dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai moral dan etika kerja. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya membentuk kesadaran yang lebih kuat terhadap konsekuensi dari tindakan tidak etis seperti kecurangan. Oleh karena itu, ketika kompensasi dianggap adil dan sesuai, terutama oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, maka mereka akan cenderung menjaga moralitas dalam bekerja dan menghindari perilaku curang. Sebaliknya, meskipun mayoritas responden hanya berpendidikan SMA, hasil menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan kompensasi tetap mampu memengaruhi moralitas mereka. Ini berarti bahwa meskipun tingkat pendidikan tidak tinggi, adanya kompensasi yang sesuai tetap dapat meningkatkan moralitas, dan pada akhirnya menurunkan kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian, kesesuaian kompensasi bertindak sebagai faktor yang memediasi hubungan antara karakteristik individu (termasuk pendidikan) dan perilaku etis dalam instansi.

4.6.4 Hubungan antara Grand theory dengan hasil penelitian

Dalam konteks pemerintah desa, pendekatan ini menyarankan bahwa pencegahan fraud tidak cukup hanya dengan memperbaiki kompensasi, tapi harus diiringi dengan pembinaan moralitas aparatur desa. Moralitas menjadi "filter" utama dalam menentukan apakah individu akan terjerumus ke dalam kecurangan meskipun tekanan atau kesempatan ada. Menurut teori hexagon kecurangan yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson, tidak hanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) memengaruhi kecurangan

atau tindakan yang tidak etis, tetapi juga kemampuan (*capability*), ego (*arrogansi*), dan kolusi. Dalam konteks pemerintah desa, teori ini dapat digunakan untuk memahami mengapa moralitas aparatur desa tidak terpengaruh secara signifikan oleh kesesuaian kompensasi. Pertama, teori ini menyatakan bahwa ketika orang berada di bawah tekanan finansial, mereka cenderung melakukan kecurangan. Namun, jika kesesuaian kompensasi tidak memengaruhi moralitas dalam praktik pemerintah desa, berarti tekanan finansial pribadi bukanlah faktor utama yang mendorong tindakan amoral. Aparatur desa mungkin memiliki sumber penghasilan lain atau mungkin tidak merasa tekanan yang cukup besar untuk berubah sikap. Kedua, peluang menjadi sangat penting. Bukan kompensasi yang rendah yang menyebabkan moralitas aparatur desa terganggu, tetapi kegagalan sistem pengawasan, kontrol internal yang lemah, dan kurangnya transparansi. Bahkan mereka yang menerima kompensasi yang layak memiliki kesempatan untuk menyimpang. Ketiga, elemen rationalization memungkinkan seseorang untuk membenarkan tindakannya bukan karena gajinya yang tidak sesuai, tetapi karena adanya pemberaran sosial. Misalnya, mereka dapat mengatakan bahwa semua orang juga melakukannya atau bahwa uang desa bisa digunakan asal ada manfaatnya. Dengan kata lain, kebenaran pribadi atau budaya lokal dapat mengubah standar moral. Keempat, kemampuan menunjukkan bahwa orang dengan pengetahuan, posisi strategis, atau keterampilan administratif yang baik dapat memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Moralitas tidak ditentukan oleh gaji yang diterima, tetapi oleh kemampuan mereka untuk mengatasi sistem. Kelima, kebanggaan diri atau

keangkuhan pribadi dapat menjadi motivasi utama untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral. Aparatur yang merasa lebih penting atau berjasa mungkin merasa berhak atas sumber daya yang ada, terlepas dari gaji yang mereka terima. Keenam, konspirasi menunjukkan bahwa kerja sama antarpihak sering menyebabkan tindakan tidak etis. Moralitas kolektif yang rusak ini tidak terkait langsung dengan kompensasi; sebaliknya, mereka terkait dengan norma kelompok yang dibentuk di tempat kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya atau kenyamanan kompensasi yang diterima oleh pegawai tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan kecurangan. Namun, secara statistik, ditemukan bahwa semakin besar dan sesuai kompensasi yang diterima, maka tingkat moralitas pegawai cenderung meningkat. Moralitas yang tinggi ini pada akhirnya berdampak signifikan dalam menekan potensi terjadinya kecurangan. Dengan kata lain, kompensasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kecurangan melalui peningkatan moralitas.

Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan Fraud Hexagon Theory, yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya enam faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), pemberian alasan (*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan ketidaksesuaian gaya hidup atau keserakahan (*ego*). Kompensasi yang layak dan sesuai dapat mengurangi tekanan finansial, sehingga salah satu elemen utama penyebab kecurangan yakni tekanan dapat ditekan. Selain itu, pegawai yang merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi

cenderung tidak mencari pemberian untuk melakukan tindakan curang, sehingga mengurangi elemen rasionalisasi.

kompensasi yang memadai juga dapat menurunkan potensi munculnya sikap arogansi dan keserakahan. Pegawai yang merasa dihargai dan diberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja mereka tidak akan merasa berhak secara berlebihan atas hal-hal di luar haknya, serta tidak terdorong untuk memenuhi gaya hidup berlebihan melalui cara-cara yang menyimpang. Dengan demikian, moralitas yang terbentuk dari kompensasi yang sesuai dapat menjadi pengendali internal terhadap peluang dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung Fraud Hexagon Theory dengan menunjukkan bahwa kompensasi yang layak dan adil dapat berfungsi sebagai faktor pencegah kecurangan, terutama melalui peningkatan moralitas pegawai yang berdampak pada berkurangnya tekanan, rasionalisasi, arogansi, dan keserakahan. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan sistem kompensasi sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan mencegah kecurangan di lingkungan kerja.

4.6.5 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan, serta tidak berpengaruh signifikan terhadap moralitas aparat desa. Namun demikian, kesesuaian kompensasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan melalui moralitas. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang

menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian lain juga menyatakan bahwa moralitas aparat dan kesesuaian kompensasi secara langsung berpengaruh positif terhadap kecurangan, yang mengindikasikan bahwa semakin sesuai kompensasi, maka kecurangan dapat meningkat jika disertai moralitas yang rendah. Di sisi lain, hasil penelitian ini justru menyoroti bahwa kompensasi yang sesuai tidak serta-merta mendorong terjadinya kecurangan, kecuali jika dimediasi oleh tingkat moralitas yang rendah. Ini berarti, moralitas menjadi faktor kunci dalam menjembatani hubungan antara kompensasi dan perilaku kecurangan. Dengan kata lain, meskipun kompensasi diberikan secara adil, apabila moralitas aparat desa rendah, maka peluang terjadinya kecurangan tetap ada.

Hasil ini juga selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kompensasi dapat berpengaruh positif terhadap semangat kerja, namun tidak selalu berkorelasi langsung dengan integritas atau etika kerja. Artinya, meskipun karyawan merasa puas secara material, hal tersebut tidak menjamin mereka akan menghindari perilaku menyimpang jika moralitas mereka tidak kuat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini menguji tentang pengaruh kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecurangan pada pemerintah desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dengan hipotesis pertama, Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Dibuktikan bahwa variabel dengan nilai P-Value sebesar $0.449 > 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $0.653 < 1.96$. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kesesuaian kompensasi yang diterima oleh aparat desa dengan beban kerja atau tanggung jawabnya, tidak secara langsung mencegah atau mendorong perilaku curang. Dengan kata lain, meskipun kompensasi sudah sesuai, hal tersebut tidak cukup untuk secara langsung memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan. Hipotesis kedua, Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap moralitas. Dibuktikan bahwa variabel dengan nilai P-Value sebesar $1.487 > 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $0.138 < 1.96$. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi juga berpengaruh negatif terhadap tingkat moralitas. Ini mengindikasikan bahwa persepsi mengenai adil atau tidaknya kompensasi tidak cukup kuat dalam membentuk atau meningkatkan nilai-nilai moral individu dalam pemerintahan desa.

Moralitas kemungkinan besar lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, budaya organisasi, atau pembinaan etika kerja. Hipotesis ketiga bahwa Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan melalui moralitas. Dibuktikan bahwa variabel dengan nilai P-Value sebesar $5.693 > 0.05$ atau dengan tstatistik sebesar $0.000 < 1.96$. Meskipun tidak terdapat pengaruh langsung antara kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan dan moralitas, namun uji mediasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui variabel moralitas. Artinya, kesesuaian kompensasi dapat memengaruhi moralitas secara tidak langsung dalam kondisi tertentu, dan moralitas inilah yang kemudian memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan. Dengan kata lain, ketika seseorang merasa bahwa kompensasi yang diterimanya sesuai, hal tersebut dapat menciptakan perasaan keadilan yang secara perlahan membentuk nilai moral, dan pada gilirannya, moralitas yang tinggi mampu menekan perilaku kecurangan.

Maka jika kesesuaian kompensasi dan moralitas semakin rendah maka tingkat kecurangan semakin tinggi, dan jika kesesuaian kompensasi dan moralitas semakin tinggi maka tingkat kecurangan semakin rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang mungkin dapat diberikan peneliti untuk beberapa pihak yang mungkin saja dapat digunakan sebaik-baiknya di antaranya :

1. Bagi pemerintah desa kiranya perlu memiliki sistem insentif bagi perilaku jujur dan transparan, pastikan setiap proses keuangan administrasi terbuka dan

mudah diawasi oleh masyarakat. Kompensasi yang layak dapat mengurangi insentif untuk melakukan kecurangan karena ada hal yang diluar kendali kita.

2. Bagi peneliti selanjutnya peneliti mengharapkan untuk mempertimbangkan variabel lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kecurangan dan bisa memperluas lingkup penelitian. Hal ini diperlukan agar guna meningkatkan akurat hasil dapat lebih baik dari penelitian ini yang diperoleh masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alou, S. D., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Konstruksi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 139–148. <Https://Doi.Org/10.32400/Gc.12.01.17146.2017>
- Adam. (2022). *Kesesuaian Kompensasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan.*
- Adi, P. H., Susilo, H., & Praptika, A. (2016). Pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai serta implikasinya terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 45–60.
- Adinda, V., & Ikhsan, A. (2015). Pengaruh kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 410–422.
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Konsep dan Indikator.* Yogyakarta: Deepublish.
- Albrecht, W. S. (2017). *Fraud examination* (5th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Amanda, R., Setiawan, D., & Kurniawan, T. (2019). *Pengujian Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif.* Jurnal Metodologi Penelitian, 12(1), 34–42.
- Aprilia, F., & Yuniasih, N. W. (2021). *Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan.* Jurnal Akuntansi dan Auditing, 15(2), 123–135.
- Aranta, I. G. A. (2013). *Etika dan Moral dalam Organisasi.* Yogyakarta: Deepublish.
- ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts). (1990). *A statement of basic auditing concepts.* New York, NY: American Accounting Association.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2021). *Report to the nations: 2020 global study on occupational fraud and abuse.* Austin, TX: ACFE.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2000). *Report to the nations on occupational fraud and abuse.* Austin, TX: ACFE.

- Banowati, A. N. M., Utami, S. S., & Ririn Indriastuti, D. R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Wonogiri. *JEKU (Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 22(3), 271–280.
- BRUTO, P., DAN, I., DI, P., & PRAKOSO, W. F. (2022). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Tahun 2023. *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2024, 30662. Https://Repository.Unsri.Ac.Id/110490/16/RAMA_60201_01021381722149_0006047308_0025058206_01_Front_Ref.Pdf
- Chandra, A., & Ikhsan, A. (2015). Pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai serta implikasinya terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 395–409.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. New York: Free Press.
- Cressey, D. R. (2015). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement* (reprint edition). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Damayanti, N. (2023). *pengendalian internal terhadap akuntansi dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada PT X)*.
- Damayanti, P., & Purwantini, A. H. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, Dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang). *Jurnal The 4th FEB Enefecium: Business And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*, 391–410.
- Desa, P., Karyamukti, D., Mootilango, K., Gorontalo, K., & Fachri Arsjad, M. (2018). Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi. *Public Administration Studies*, 1(1), 17–32.
- Desviana, R., Sari, D. P., & Putra, I. N. (2020). Perkembangan model fraud: Dari fraud diamond hingga fraud hexagon. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45–53.
- Dewi, M. R., Santoso, B., & Putra, A. (2017). Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap perilaku kecurangan pada karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 123–130.

- Dewi, P.P. Dan Rani, P. Dp. (2017). Moralitas Aparat, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 2(2), 318–330.
- Dewi, P. I. S., & Adiputra, I. M. P. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 1–7.
- Eni. (1967). Tindakan Kecurangan (Fraud). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 5–24.
- Fajria, N. (2019). Pengaruh tekanan psikologis terhadap perilaku kecurangan karyawan. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, 8(1), 33–40.
- Fazriyah, I., Jatnika, I., Soedarwati, E., & Kusnadi. (2024). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Bisnis*, 12(1), 20–34. <Https://Doi.Org/10.62739/Jb.V12i1.62>
- Gazali, E. (2021). *Audit forensik dan investigasi kecurangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ichsan Siregar, M., & Hamdani, M. (2018). 1) *Jalan Jendral Sudirman No. 629 KM 4 Palembang Kode Pos 30129* 2) *Jalan Professor Dokter Ir. 9(1)*, 35145. <Www.Tribunnews.Com>
- Hardani, A., [Nama Penulis Lain], & [Nama Penulis Lain]. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia* (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hulinggi, M., Latjengke, M., & Hasan, H. (2020). *Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Era Otonomi Daerah*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2020). *Standar Profesional Akuntan Publik* (SPAP), Seksi 316: Tanggung Jawab Auditor Mengenai Kecurangan. Jakarta: IAPI
- Indrianasari, R. (2017). *Peran Aparat Desa dalam Administrasi Pemerintahan*

- Desa.* Jakarta: Rajawali Pers.
- International Federation of Accountants. (2020). *Handbook of international quality control, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements* (Vol. I). New York: IFAC.
- Janna, R. (2021). *Metode Penelitian dan Pengukuran Validitas Data*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Islamiyah, E. F. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dana Desa Se Mertoyudan*. <Http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/Id/Eprint/1701>
- Islamiyah, N., Muslih, M., & Huda, M. (2020). *Peran Moralitas dalam Pencegahan Fraud pada Organisasi Sektor Publik*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 45–58.
- Junia. (2017). *Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*.
- Kingsley, A. (2015). *Fraud and its implications in organizational management*. London: Routledge.
- Kualitas, T., Publik, P., Syukriyati, E., & Solikin, I. (2018). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 269–284. <Https://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/JRAK/Article/View/13067%0Ahttps://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/JRAK/Article/Viewfile/13067/7718>
- Kurniawan, G. (2013). Pengaruh Moralitas, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(September), 3. <Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/714/471>
- Kurniawan, J., & Haq, A. (2022). Pengaruh Moralitas Individu, Integritas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1691–1702. <Https://Doi.Org/10.25105/Jet.V2i2.14532>
- Lamere, S., Hartono, R., & Putri, M. (2021). *Analisis Validitas Diskriminan dalam Model SEM*. *Jurnal Statistika dan Data*, 7(2), 98–107.
- Lamusu, R., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22–38.

- Listiana, E. (2012). Pengaruh tekanan ekonomi terhadap perilaku kecurangan pada pegawai sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 78–85.
- Lestari, I., & Ayu, P. (2021). *Pengaruh Tingkat Moral Individu terhadap Perilaku Etis dalam Pengambilan Keputusan*. Jurnal Etika dan Perilaku Organisasi, 5(2), 4–53.
- Lyanarachchi, G. A. A. (2015). The impact of moral reasoning on ethical behavior: An empirical study. *Journal of Business Ethics*, 130(3), 485–497.
- Majid, A. (2015). *Pendidikan Karakter: Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marta Nasrani Gee, Alwinda Manao, A. S. G. (2021). Pareto: Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 10–22.
- Ningsih. (2020). *Etika dan Moral dalam Perspektif Filsafat*.
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 10(2), 79. <Https://Doi.Org/10.35800/Jjs.V10i2.24955>
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaran Pemerintah Desa. *Jakarta: Erlangga(2011)*, 22, 17–36. <Https://Medium.Com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>
- Nurhayati, N. (2022). Komitmen Organisasi, Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*, 13(01), 114.136. <Https://Doi.Org/10.25134/Logika.V13i01.6825>
- Nurmalasari. (2019). Modul Auditing. *Accounting*, 54.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Aparatur Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262.
- Pulungan, M., & Rivai, F. (2021). *Analisis Statistik untuk Penelitian Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Medan: Universitas Negeri Medan Press.
- Putri, D. A. (2016). Pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja dan pencegahan

- kecurangan pada karyawan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 10(1), 25–32.
- Radjak, L. I., & Nani, M. T. R. (2020). pengaruh perilaku perangkat desa terhadap kecenderungan fraud dana desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Pulubala). *JSAP : Journal Syariah And Accounting Public*, 3(2), 73. <Https://Doi.Org/10.31314/Jsap.3.2.73-81.2020>
- Riniwati, S. (2016). *Manajemen sumber daya manusia: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanuari, J. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarci Ladiku, Sulila, I., & Aneta, Y. (2021). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan, Di Raya, Gentuma Gorontalo, Kabupaten Ladiku, Utara. *JAMBURA; Journal Adminsitration And Public Service*, 2(1), 50–58.
- Sari, N. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 1–23.
- Sari, R. N., Supriyono, B., & Setiyono, B. (2020). Kepala desa dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 15–22.
- Saro, D., & Nugroho, R. (2020). Konflik kepentingan dan dampaknya terhadap tata kelola perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 15(2), 78–85.
- Septiani, A. K., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1306–1317. <Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i6.604>
- Setiyono, B. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan kerja dan implikasinya pada kecurangan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 101–110.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sani, M., & Maharani, R. (2013). *Analisis Path dan Aplikasi dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671.
<Https://Doi.Org/10.22219/Jrak.V12i3.22363>
- Susanto, A., Nugroho, Y., & Wibowo, S. (2020). *Analisis Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarsono, O. (2020). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta 2018*. 1–23.
- Trianto, A. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tuankotta, F. (2014). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, F. (2016). *Akuntansi forensik dan audit investigatif* (Cetakan ke-3). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan Tahun 2016.
- Utami, D., & Siswanto, J. (2021). *Pengukuran Validitas dan Reliabilitas Menggunakan Average Variance Extracted (AVE)*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 45–54.

- Vousinas, G. L. (2019). *Fraud examination and prevention: A comprehensive guide*. New York: Academic Press.
- Wiyono, B. (2020). *Evaluasi Discriminant Validity pada Model Pengukuran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wulandari, D. (2016). Pengaruh penegakan hukum dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 112–120.
- Wulandari. (2023). *kajian literatur a . deskripsi Teori*. 1(1), 11–34.
- Wulandhari, D. A., Salsadilla, S., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Tekanan Finansial Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Economina*, 2(7), 1842–1854. <Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i7.682>
- Zainal, R., Fauzihardani, E., & Helmy, H. (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Akuntansi*, 1–25. <Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/668>

LAMPIRAN

ANALISIS DATA

1. Outer loading

	X1	X2	Y
X1.1	0,777		
X1.2	0,716		
X1.3	0,907		
X2.1		0,926	
X2.2		0,926	
X2.3		0,927	
X2.4		0,925	
Y.1			0,784
Y.2			0,889
Y.3			0,731

2. R square

	R Square	Adjusted R Square
X2	0,201	0,182
Y	0,582	0,561

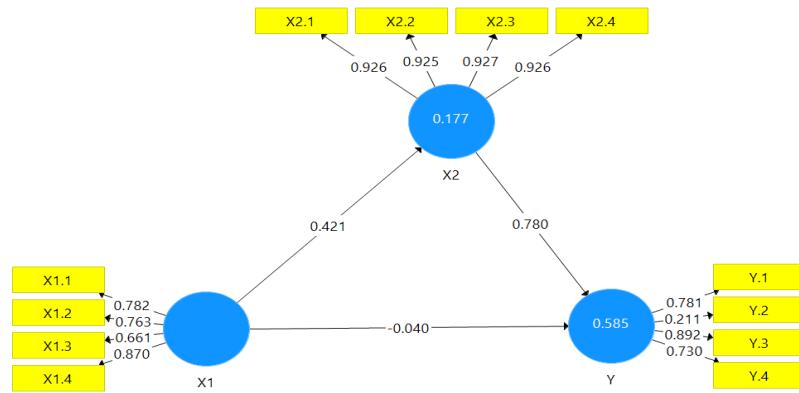
3. Validitas dan Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1	0,776	1,083	0,844	0,646
X2	0,945	0,946	0,960	0,857
Y	0,728	0,780	0,845	0,646

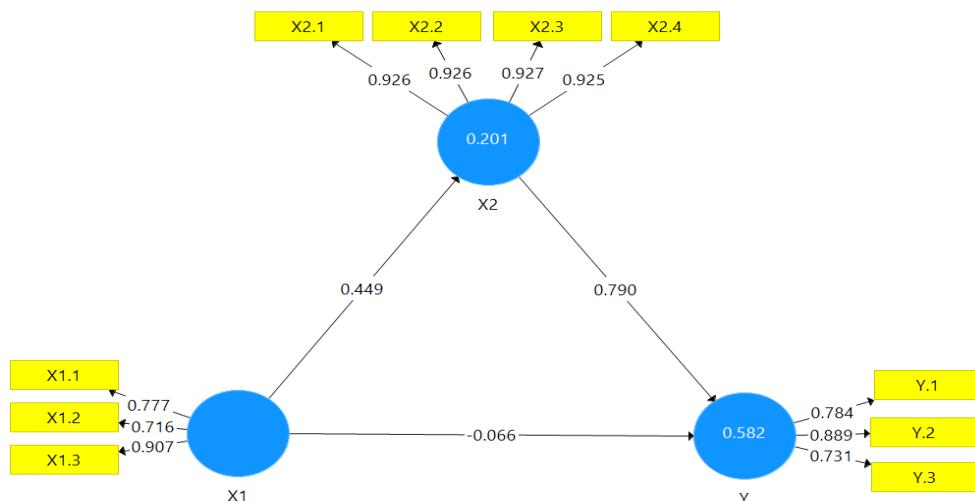
4. Validitas Diskriminan

	X1	X2	Y
X1	0,804		
X2	0,449	0,926	
Y	0,289	0,760	0,804

5. Outer Loading



Etimasi model awal penelitian



Perubahan outer model Re-estimasi

DOKUMENTASI



KUISIONER PENELITIAN

Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Di Tempat

Perihal :

Lampiran : Satu Berkas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Jumiati Abelia Mahmud

Nim : E1121050

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Adapun judul dari penelitian yang dilakukan adalah **"Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara"**.

Agar penelitian ini dapat dilakukan, sangat di butuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk maksud tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i agar berkenan mengisi kuisioner yang semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Peneliti,

Sri Jumiati Abelia Mahmud
NIM. E1121050

KUISIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi daftar berikut :

Nama Desa :

Nama Responden :

Jabatan :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1

S2 S3

Lama bekerja : Kurang dari 1 tahun

1–3 tahun

3–5 tahun

Lebih dari 5 tahun

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Mohon berikan tanda *Cheklist* (✓) pada salah satu jawaban terbaik. Nilai untuk pertanyaan terbaik dari nomor 1 s.d 5 adalah sebagai berikut :

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Kurang Setuju

2 = Tidak Setuju

1= Sangat Tidak Setuju

DAFTAR PERNYATAAN

X1. Kesesuian Kompensasi

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Gaji yang saya terima sudah sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan saya.					
2	Saya merasa insentif yang diterima cukup adil dan sesuai dengan kontribusi saya.					
3	Tunjangan yang diberikan instansi sesuai dengan kebutuhan saya.					
4	Saya merasa puas dengan fasilitas yang diberikan oleh instansi.					

X2. Moralitas

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Kejujuran adalah nilai yang paling penting dalam kehidupan saya.					
2	Saya berhasil mengatur waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu					
3	Saya merasa puas jika saya telah melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab yang baik.					
4	Saya merasa bangga hidup di lingkungan yang beragam dan saling menghargai perbedaan.					

Y. Kecurangan

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Laporan keuangan memiliki data yang jelas dan tidak dapat diubah.					
2	Penggunaan aset instansi untuk kepentingan pribadi dianggap wajar oleh sebagian pegawai.					
3	Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat mengurangi potensi korupsi.					
4	Memanipulasi data menggunakan program komputer dianggap sebagai bentuk pelanggaran.					

TABULASI DATA

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
5	5	5	4	5	4	5	5	4	3	5	4
5	5	3	3	3	4	4	3	3	5	3	3
4	4	3	2	3	3	4	3	5	4	3	3
5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4
5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
5	5	5	4	5	5	5	5	4	3	5	4
5	5	5	4	5	4	5	5	4	3	5	4
3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	4	4
3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	5	3
3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	5	3
4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	3	3
3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4
3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	5	4
4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	5	4
4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4
4	4	3	4	5	4	5	5	5	1	5	1
4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4
4	2	2	4	5	5	5	4	5	2	5	5
4	4	2	4	5	5	5	5	4	2	4	5
2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	5	4	4	4	4	1	4	1
4	4	3	3	5	4	4	4	4	1	4	1
4	3	3	2	4	4	4	4	5	2	5	4
4	1	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5
4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	1	5	5
4	3	4	4	4	5	5	5	5	2	5	5
3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
2	2	3	2	1	1	1	1	2	3	1	1
4	3	4	3	4	4	4	4	4	1	4	4

4	4	1	4	5	5	5	5	2	2	5	4
2	2	2	2	4	4	4	5	5	2	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	3	4
5	5	4	4	5	5	5	5	4	2	4	4
5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	5	5
4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4883/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Pemerintah Desa se-Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Sri Jumiati Abelia Mahmud
NIM : E1121050
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Terhadap Kecurangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
Lokasi Penelitian : Kecamatan Anggrek

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 19/08/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN ANGGREK**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Ilangata Kode Pos : 96525

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 070/K.Angg/ 011 /III/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jusuf Abdullah Hasan, S.AG
NIP : 19700720 199401 1 002
Jabatan : Camat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Jumiatyi Abelia Mahmud
NPM : E1121050
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
Lokasi Penelitian : Kecamatan Anggrek

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Kecamatan Anggrek Pada tanggal 9 Januari 2025 dalam rangka penyusunan SKRIPSI.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar digunakan seperlunya.


JUSUF ABDULLAH HASAN, S.AG
NIP. 19700720 199401 1 002





27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

27%	Internet sources
8%	Publications
15%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.





27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

27%	Internet sources
8%	Publications
15%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI**

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 058/SRP/FE-UNISAN/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN	:	092811690103
Jabatan	:	Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa	:	Sri Jumiatil Abelia Mahmud
NIM	:	E1121050
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Terhadap Kecurangan Pada Pemerintah Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya


 Mengetahui
 Dekan,
DR. Musafir, SE., M.Si
 NIDN. 0928116901

Gorontalo, 07 Mei 2025

Verifikator,


Nurhashmi, S.KM

Terlampir :Hasil Pengecekan Turnitin